

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN ANAK KORBAN
BULLYING OLEH DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
TRENGGALEK**

**(Studi Pasal 5 Peraturan Menteri Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun
2015 Tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

**NABILA AHNAFI SALSABILA
NIM 175010100111110**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi: PELAKSANAAN PERLINDUNGAN ANAK KORBAN BULLYING OLEH DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TRENGGALEK (Studi Pasal 5 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak)

Identitas Penulis :

a. Nama : Nabila Ahnafi Salsabila

b. NIM : 175010100111110

Konsentrasi : Hukum Administrasi Negara

Jangka Waktu Penelitian : 6 bulan

Disetujui Pada Tanggal 02 Agustus 2021

Pembimbing I



Herlin Wijayati, S.H., M.H.
NIP. 196010201986012000

Pembimbing II



Dr. Dewi Cahyandari, S.H., M.H.
NIP. 2016079001312001

Ketua Bagian
Hukum Administrasi Negara



Lutfi Effendi, S.H., M.Hum.
NIP. 196008101986011002



HALAMAN PENGESAHAN
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN ANAK KORBAN BULLYING OLEH
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TRENGGALEK (Studi Pasal 5

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Sistem
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak)

SKRIPSI

Oleh :

Nabila Ahnafi Salsabila

175010100111110

Skrripsi ini telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal
 06 Juli 2021 dan disahkan pada tanggal 02 Agustus 2021

Pembimbing I



Herlin Wijayati, S.H., M.H.
 NIP. 196010201986012000

Pembimbing II



Dr. Dewi Cahyandari, S.H., M.H.
 NIP. 2016079001312001

Mengetahui,
 Ketua Jurusan Ilmu Hukum
 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya



Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum.
 NIP. 196705031991032002

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia dan rahmat yang tiada kira sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik penulisan skripsi ini yang berjudul **“PELAKSANAAN PERLINDUNGAN ANAK KORBAN BULLYING OLEH DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TRENGGALEK (Studi Pasal 5 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak)”** dengan tepat waktu. Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir untuk meraih gelar strata 1 Universitas Brawijaya. Setelah selesai melaksanakan penelitian kurang lebih selama 6 bulan, penulis juga telah menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai hasil dari wawancara dengan sumber yang berada di instansi, hasil dari data-data primer serta sekunder, Dinas Sosial, dan Undang-undang terkait dengan judul penulisan penulis.

Penulis sangat berharap, setelah membaca dari penelitian yang penulis tuangkan dalam skripsi ini para pembaca dapat mengerti dan mampu memahami lebih dalam tentang peran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih kurang dari kata sempurna, karena mungkin masih ada kekurangan dalam penulisannya. Maka penulis dengan sangat senang hati menerima saran dan kritik yang membangun kedepannya, agar dapat menghasilkan laporan yang lebih baik lagi dari sekarang.

Tidak lupa pula ucapan terimakasih penulis berikan kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusinya dalam penulisan skripsi ini yaitu kepada:

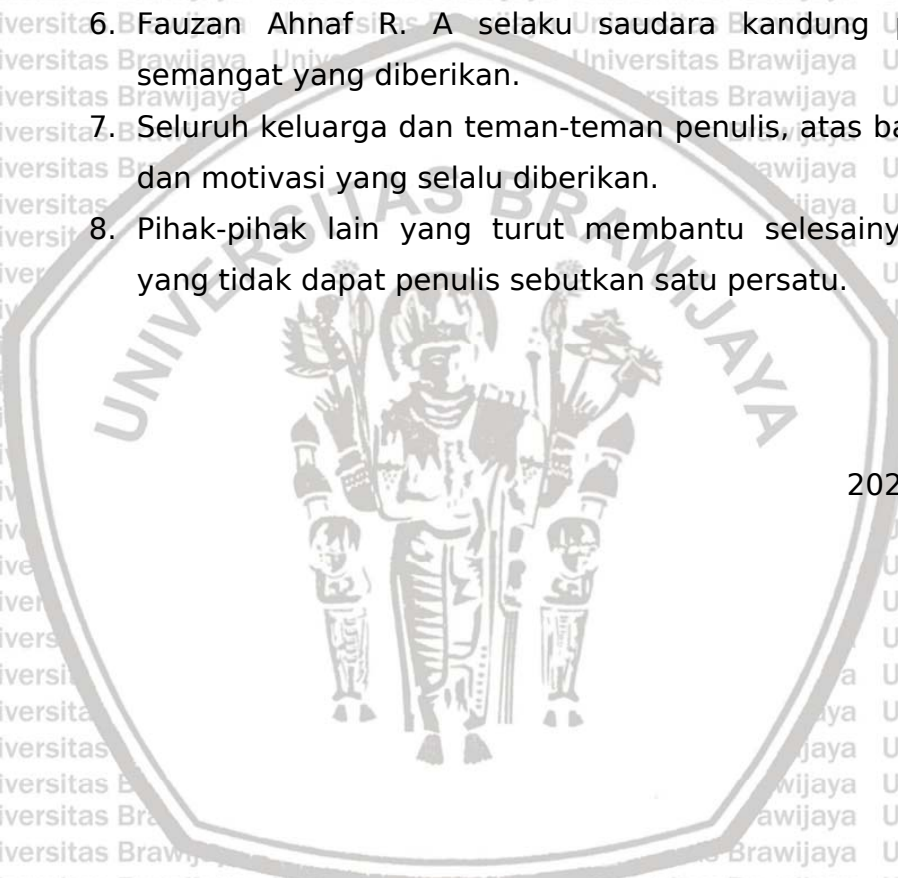
1. Bapak Dr. M. Ali Safa'at, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Lutfi Effendi, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara.

3. Ibu Herlin Wijayati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan serta dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan ini.
4. Ibu Dr. Dewi Cahyandari, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan, motivasi serta dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan ini.
5. Ibu Nunung Tri Sulistyarini dan Ayah Agus Riyanto selaku Orangtua penulis, atas bantuannya baik berupa materil maupun formiil.
6. Fauzan Ahnaf R. A selaku saudara kandung penulis, atas semangat yang diberikan.
7. Seluruh keluarga dan teman-teman penulis, atas bantuan formiil dan motivasi yang selalu diberikan.
8. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

April

2021

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL, GRAFIK, dan BAGAN.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN DAN METODE PENELITIAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian	
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Pendekatan Penelitian.....	13
3. Lokasi Penelitian.....	13
4. Jenis Dan Sumber Data.....	13
5. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel.....	14
6. Teknik Pengumpulan Data.....	16
7. Teknik Analisis Data.....	16
8. Definisi Operasional.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
1. Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan.....	19
2. Tinjauan Umum Tentang Fungsi Perlindungan Hukum.....	19
3. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).....	21
4. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	22
5. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak.....	23
6. Tinjauan Umum Tentang Tindakan <i>Bullying</i>	23
7. Tinjauan Umum Tentang Upaya Promotif, Preventif, Kuratif, Rehabilitatif.....	24
BAB III PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Peneltian	
1. Gambaran Umum Kabupaten Trenggalek	
a. Keadaan Geografis.....	25

b. Keadaan Topografi.....	25
c. Keadaan Demografi.....	26
d. Visi dan Misi Kabupaten Trenggalek.....	27
2. Gambaran Umum Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek.....	
a. Letak Kantor.....	27
b. Visi dan Misi.....	28
c. Struktur Organisasi.....	28
d. Tugas dan Fungsi.....	29
B. Pelaksanaan Perlindungan Anak Korban <i>Bullying</i> Oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek.....	30
1. Pelaksanaan Perlindungan Promotif dan Preventif.....	35
2. Pelaksanaan Perlindungan Kuratif.....	37
3. Pelaksanaan Perlindungan Rehabilitatif.....	40
C. Hambatan dari Pelaksanaan Perlindungan Anak Korban <i>Bullying</i> Oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek.....	47
1. Layanan PUSPAGA (Pusat Pengembangan Keluarga) yang dimiliki oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek kurang dikenal oleh masyarakat Kabupaten Trenggalek.....	47
2. Kurangnya Digitalisasi Informasi Layanan dan Aduan yang dilakukan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek.....	50
3. Pengetahuan Orang Tua dan/atau Keluarga yang Terbatas terkait Permasalahan Pola Asuh pada Anak.....	53
4. Kondisi Geografis Kabupaten Trenggalek.....	55
D. Upaya yang Dapat Dilakukan dalam Pelaksanaan Perlindungan Anak Korban <i>Bullying</i> Oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek.....	
1. Melaksanakan Pertemuan Terkait Perempuan, Anak, Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya Secara Rutin.....	57

2. Meningkatkan Fasilitas Layanan Informasi dan Aduan dalam Bentuk Digital.....	59
3. Melakukan Kerjasama dengan Memberdayakan Organisasi Kemasyarakatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang Terdapat di Setiap Desa.....	61
4. Pemberian Anggaran Khusus oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek.....	63
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	57



DAFTAR TABEL, GRAFIK dan BAGAN

DAFTAR TABEL

1.1	Orisinalitas Penelitian.....	7
1.2	Kondisi Topografi Kabupaten Trenggalek.....	56

DAFTAR GRAFIK

1.1	Data Anak Korban Bullying.....	31
1.2	Pengetahuan Masyarakat Trenggalek Terhadap Keberadaan	

	PUSPAGA.....	48
--	--------------	----

1.3	Pengetahuan Masyarakat Trenggalek Terhadap Informasi Terkait Kekerasan Anak yang diberikan oleh Dinas sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	49
-----	---	----

1.4	Sumber Informasi yang Diterima oleh Masyarakat Kabupaten Trenggalek.....	51
-----	--	----

1.5	Kesediaan Masyarakat Kabupaten Trenggalek Melibatkan Pihak Ketiga dalam Penyelesaian Masalah <i>Bullying</i> pada Anak.....	53
-----	---	----

DAFTAR BAGAN

1.1	Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek.....	28
-----	--	----

1.2	Layanan Respon dan Rujukan Kasus oleh PUSPAGA.....	37
-----	--	----

1.3	Layanan Konseling oleh PUSPAGA Terhadap Anak Korban <i>Bullying</i>	39
-----	---	----

1.4	Langkah Pelayanan Bantuan Hukum.....	43
-----	--------------------------------------	----

1.5	Langkah Pelayanan Rehabilitasi Sosial.....	46
-----	--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Responden.....	72
----------------------------------	----



RINGKASAN

NABILA AHNAFI SALSABILA, Hukum Administrasi Negara, Fakultas

Hukum, Universitas Brawijaya, Juni 2021, **PELAKSANAAN**

PERLINDUNGAN ANAK KORBAN BULLYING OLEH DINAS SOSIAL,

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN TRENGGALEK (Studi Pasal 5 Peraturan Menteri

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 6

Tahun 2015 Tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan Dan

Perlindungan Anak), Herlin Wijayanti, S.H., M.H, Dr. Dewi

Cahyandari, S.H., M.H.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Anak Korban Bullying, Perlindungan, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak korban *bullying*. Dari hasil penelitian, peneliti menemukan adanya permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu: kurang dikenalnya layanan PUSPAGA yang dimiliki oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek oleh masyarakat, Kurangnya Digitalisasi Informasi Layanan dan Aduan yang dilakukan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek, Pengetahuan Orang Tua dan/atau Keluarga yang Terbatas terkait Permasalahan Pola Asuh pada Anak dan kondisi geografis Kabupaten Trenggalek. Hal tersebut yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan anak korban *bullying* yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih metode yuridis sosiologis dengan menggunakan metode analisis deskriptif dimana peneliti akan mendiskripsikan Pelaksanaan Perlindungan Anak Korban *Bullying* Oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Trenggalek berdasarkan data yang diperoleh dilapangan kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan.

SUMMARY

Nabila Ahnafi Salsabila, *The Law of State Administration, Law Faculty, Brawijaya University, July 2021, **Child Protection by Social, Woman Empowerment, and Child Protection Agency in the Regency of Trenggalek over Bullying among Children (A study of Article 5 of Regulation of Minister of Woman Empowerment and Child Protection Number 6 of 2015 concerning Woman Empowerment and Child Protection System)***

Herlin Wijayanti, S.H., M.H, Dr. Dewi Cahyandari, S.H., M.H.

Keywords: *implementation, bullied child, protection, social, woman protection, and child protection.*

Social, Woman Empowerment and Child Protection Agency in the Regency of Trenggalek is responsible to protect bullied children. The observation conducted as part of this research has found out that PUSPAGA service under the social agency is not widely known by people in Trenggalek. Other hampering factors in protecting the children involve a lack of digitalized information on services and grievances that the agency should establish, and limited knowledge of parents and/or family members regarding parenting style and geographical conditions in the Regency of Trenggalek. This research employed the socio-juridical method, while the data were analysed based on descriptive technique, elaborating on the implementation of child protection by the agency in The Regency of Trenggalek following the analysis of the data before a conclusion was drawn.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan bagian dari aset serta potensi yang dimiliki oleh suatu negara. Kondisi negara di masa yang akan datang dapat ditentukan dengan bagaimana kondisi generasi anak pada masa sekarang. Definisi dari anak dapat dilihat secara sosiologis, psikologis, dan yuridis. Secara sosiologis anak diartikan sebagai seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin sedangkan secara psikologis kriteria seseorang dianggap anak didasarkan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya sehingga dapat dikualifikasikan bahwa anak adalah seseorang yang berada pada masa bayi hingga masa remaja awal antara usia 16-17 tahun.¹ Selain kedua definisi tersebut juga terdapat definisi secara yuridis yang disebutkan di beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, Termasuk dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak, kategori anak adalah usia 12 sampai dengan 18 tahun. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, anak mengacu pada mereka yang berusia di bawah 18 tahun dan yang masih berada dalam kandungan. Terkait permasalahan anak – Pasal 28B Ayat (2) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”; Berhubungan dengan pasal tersebut diatas, pemberian perlakuan kepada anak harusnya sama dengan manusia lainnya. Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang

¹Liza Agnesta Krisna, **Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum**, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm.6

khass yang dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran, dan kehendaknya sendiri.² Pada hakikatnya anak merupakan pribadi yang tidak dapat melindungi dirinya sendiri sehingga dibutuhkan perlindungan dan pendampingan yang dapat diperoleh dari lingkungan sekitarnya. Namun, sangat disayangkan banyak sekali kondisi dimana lingkungan tersebut yang seharusnya menjadi pendukung tumbuh kembang anak tapi realitanya menjadi kondisi yang sangat merugikan anak.

Usia anak merupakan usia dimana seseorang pada tingkatan keingintahuan yang sangat tinggi dan keinginan untuk meng-*eksplorasi* segala hal serta juga diikuti dengan emosi yang belum stabil. Kondisi tersebut seringkali menimbulkan perilaku *delinkuen* pada anak. Perilaku *delinkuen* adalah kecenderungan untuk melakukan tindakan menyimpang, melanggar aturan atas norma yang berlaku yang menimbulkan keresahan masyarakat, sekolah maupun keluarga dan dapat mengakibatkan kerugian serta kerusakan baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain.³ Salah satu bentuk perilaku *delinkuen* tersebut adalah *bullying*. Secara umum *bullying* adalah seseorang yang terbiasa berusaha untuk menyakiti atau mengintimidasi mereka yang dianggap lemah.⁴ Dewasa ini perkembangan teknologi menjadi penyebab anak melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan termasuk *bullying*, dimana dahulu tindakan *bullying* biasanya dilakukan secara konvensional tetapi sekarang dapat dilakukan melalui media sosial dengan mudah. Sering kali anak yang melakukan tindakan tersebut tidak merasa bahwa tindakan yang dilakukan kepada anak lain merupakan tindakan *bullying*. Tindakan tersebut melanggar hak yang dimiliki oleh anak yaitu bebas dari diskriminasi. Selain itu, akibat dari tindakan tersebut tentunya akan berdampak terhadap masa depan anak tersebut. Trauma yang

²Viltra Biljana Bernadethe Lefaan dan Yana Suryana, **Tinjauan Psikologi Hukum dan Perlindungan Anak**, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2018, hlm.5

³Indarto Imam Budoyo, **Strategy Mengatasi Delinkuensi Pada Remaja Sekolah Menengah Pertama (SMP)**, dipresentasikan dalam Prosiding Seminar Nasional & Call Paper Psikologi Sosial 2019 Fakultas Pendidikan Psikologi UNESA, hlm. 46

⁴Widya Ayu Sapitri, **Cegah dan Stop Bullying Sejak Dini**, Guepedia, 2020, hlm. 14

dialami anak akan menimbulkan penurunan kepercayaan diri dalam berinteraksi di lingkungan masyarakat sehingga pendidikan yang seharusnya di dapatkan oleh anak akan terganggu akibat tidak adanya kepercayaan diri dalam bergaul bersama teman-teman di lingkungan sekolahnya atau disekitarnya.⁵ Kasus *bullying* pada anak di Indonesia sendiri dalam kurun waktu 9 tahun terakhir yaitu tahun 2011 sampai 2019 berjumlah 2.473 kasus yang diterima oleh KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) dan jumlahnya juga semakin bertambah.⁶ Namun, disisi lain anak memiliki hak untuk mendapat perlindungan atas tindakan-tindakan yang merugikan dirinya. Pemenuhan hak terkait perlindungan dan keamanan bagi anak dalam tindakan *bullying* sudah menjadi suatu keharusan yang utama dalam memperbaiki kelangsungan kehidupan anak tersebut. Hal tersebut juga merupakan salah satu bentuk pemenuhan kesejahteraan anak sebagai warga negara. Masyarakat yang tidak sejahtera, akan menimbulkan suatu keadaan yang tidak teratur, ketidaksejahteraan adalah awal dari kriminalitas dan ketidakteraturan social yang lain, maka Negara harus mampu menyejahterakan warga negaranya.⁷ Dalam hal ini adalah pemberian perlindungan pada anak. Perlindungan tersebut dapat diperoleh dari lingkungannya mulai dari keluarga, sekolah maupun lingkungan dan yang lebih besar yaitu pemerintah.

Indonesia merupakan negara hukum, hal tersebut dinyatakan pada Pasal 1 Ayat 3 UUD NRI 1945 yang bunyinya “Negara Indonesia adalah negara hukum.”; Sehingga dapat dipahami bahwa segala perbuatan dan tindakan telah diatur dan dilaksanakan berdasarkan pada tatanan hukum yang berlaku. Salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya pengakuan dan

⁵ Bayu Firmada Putra, **Pemenuhan Hak Perlindungan dan Keamanan Untuk Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2017, hlm.3.

⁶ Tim KPAI, **Sejumlah Kasus Bullying Sudah Warnai Catatan Masalah Anak di Awal 2020, Begini Kata Komisioner KPAI**, Berita KPAI, 10 Februari 2020 (diakses pada 22 Oktober 2020 di laman <https://www.kpai.go.id/berita/sejumlah-kasus-bullying-sudah-warnai-catatan-masalah-anak-di-awal-2020-begini-kata-komisioner-kpai>)

⁷ Dewi Cahyandari, **Kajian Yuridis Pelimpahan Kewenangan Monopoli Negara Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial**, Legal Spirit, Jilid 2, 2018, hlm.

perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan pengertian dari Hak Asasi Manusia ialah :

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Konsekuensi dari hak tersebut Indonesia wajib melaksanakan perlindungan dan penegakan HAM untuk warga negaranya karena Indonesia telah melakukan perjanjian-perjanjian Internasional dalam masalah penegakan HAM. Salah satu dari penegakan HAM yang dilakukan oleh Indonesia adalah dengan meratifikasi "*The World Convention On The Rights of The Child 1989*" atau biasa disebut dengan Konvensi Hak Anak. Konvensi Hak Anak tersebut mulai berlaku pada tanggal 2 September 1990 melalui revolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa tertanggal 20 Nopember 1989, dalam konvensi ini anak adalah pemegang hak-hak dasar dan kebebasan sekaligus sebagai pihak yang menerima perlindungan khusus.⁸ Implementasi keikutsertaan Indonesia dalam konvensi tersebut diwujudkan dalam segenap peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia. Diawali dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Anak dan dilanjutkan dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang lainnya, salah satunya ialah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana tujuan dari dibentuknya Undang-Undang tersebut disebutkan dalam Pasal 3 yaitu :

"Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari

⁸Rini Fitriani, **Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak**, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol.IINo.2, 2016, hlm.251

kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”

Setiap kebijakan harus diimplementasikan dalam tindakan-tindakan yang dapat membantu terwujudnya tujuan dari kebijakan tersebut. Dalam proses pengimplementasian kebijakan dibutuhkan sistem-sistem yang mendukung dalam pelaksanaan, begitu juga dalam pelaksanaan implementasi kebijakan mengenai perlindungan anak pemerintah membentuk sistem pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang diselenggarakan dalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam peraturan tersebut berisi tujuan dari sistem tersebut beserta cara yang dapat dilakukan demi mencapai tujuan tersebut. Salah satu tujuan dari peraturan tersebut adalah untuk memenuhi hak anak juga pemberian perlindungan khusus terhadap hak anak, hal tersebut terdapat dalam Pasal 2 Huruf c, dimana Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertujuan untuk :

c. memberikan perlindungan hak perempuan dan pemenuhan hak anak termasuk perlindungan khusus bagi anak dari berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan diskriminatif lainnya.

dimana cara untuk mencapai tujuan dalam Pasal 2 Huruf c tersebut terdapat pada Pasal 5 yaitu :

“Dalam rangka menyelenggarakan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilakukan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Untuk melakukan upaya tersebut, pemerintah pusat menunjuk pihak-pihak terkait di daerah agar secara efektif upaya tersebut dapat terlaksana. Di tingkat daerah terdapat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang ditunjuk

untuk menyelenggarakan upaya-upaya yang telah disebutkan di atas, termasuk Kabupaten Trenggalek.

Kabupaten Trenggalek merupakan kabupaten yang mendapatkan penghargaan Kabupaten Layak Anak pada tahun 2018 yang disampaikan langsung Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia yaitu Ibu Prof. Dr. Yohana Susana Yembise. Di Kabupaten Trenggalek sendiri terdapat ketentuan mengenai kabupaten layak anak yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 59 Tahun 2013 tentang Bentuk-Bentuk Perlindungan Anak dan Mekanisme Pengarustamaan Hak-Hak Anak. Mengenai pengertian Kabupaten Layak Anak (KLA) dijelaskan dalam Pasal 1 nomor 13 Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 59 Tahun 2013 tentang Bentuk-Bentuk Perlindungan Anak dan Mekanisme Pengarustamaan Hak-Hak Anak yaitu

Kabupaten Layak Anak, yang selanjutnya disingkat KLA, adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Perwujudan dari Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Trenggalek salah satunya adalah dengan adanya suatu sistem terkait pengarustamaan hak anak. Pengertian pengarustmaan hak anak terdapat pada Pasal 1 Angka 15 Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa

“Pengarustamaan hak anak adalah strategi mengintegrasikan isu-isu dan hak-hak anak ke dalam setiap tahapan pembangunan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas Peraturan Perundang-Undangan,

kebijakan, program, kegiatan dan anggaran dengan prinsip-prinsip kepentingan terbaik bagi anak.”

Pemenuhan hak anak sangat penting dalam pelaksanaan kabupaten layak anak tersebut. Salah satu pemenuhan hak anak adalah terkait pemberian perlindungan khusus dari berbagai bentuk kekerasan. Terkait perlindungan khusus tersebut juga disebutkan dalam salah satu tujuan dibentuknya Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hal tersebut juga terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang dimiliki oleh Kabupaten Trenggalek maka terdapat pada Pasal 10 huruf i Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak yaitu,

“mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, perlakuan salah lainnya, selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan.”

Salah satu bentuk dari perlindungan khusus dari berbagai bentuk kekerasan tersebut adalah perlindungan anak korban tindakan *bullying*. Dewasa ini permasalahan mengenai tindakan *bullying* pada anak kurang menjadi perhatian dan dibeberapa kondisi dikesampingkan. Pada umumnya fokus dari bentuk perlindungan hak-hak anak adalah terkait anak terlantar, anak korban kekerasan didalam rumah tangga, serta anak yang berhadapan dengan hukum. Sehingga masih banyak orang yang menganggap bahwa tindakan *bullying* pada anak merupakan tindakan yang biasa terjadi pada anak. Di Kabupaten Trenggalek juga masih banyak dijumpai peristiwa kasus *bullying* yang terjadi pada anak. Menurut data dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek tahun 2018-2020 terdapat 22 kasus *bullying* yang dialami oleh anak. Sehingga perhatian pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek terutama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek sebagai pembantu pelaksana perlindungan anak sangat dibutuhkan dalam hal ini.

Tabel I

Orisinalitas Penelitian

No	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Alasan Pembeda
1.	Lailiya Sayidah, 2018	Peran Kementerian Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Terkait Perlindungan Anak Dari Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga	1.Bagaimana upaya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dalam pencegahan kekerasan psikis pada anak-anak dalam rumah tangga? 2.Bagaimana pemulihan yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mengenai kekerasan psikis yang telah dialami anak-anak dalam rumah	Fokus dalam penelitian tersebut adalah untuk mengetahui dan menganalisis upaya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) terkait perlindungan anak dari kekerasan psikis dalam rumah tangga. Sedangkan penulis hendak menganalisis terkait penanganan yang dilakukan oleh Dinas Sosial,

			tangga?	
			3. Bagaimana kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) dengan instansi lainnya terkait perlindungan anak dari kekerasan psikis dalam rumah tangga?	Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam menangani tindakan <i>bullying</i> yang terjadi pada anak.
2.	Wahyu Agung Riyadi, 2014	Pendampingan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Mutiara di Kabupaten Klaten	Apakah upaya pendampingan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Mutiara di Kabupaten Klaten sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang	Fokus dalam penelitian tersebut adalah mengetahui dan menganalisis upaya pendampingan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

				(P2TP2A) Mutiara di Kabupaten Klaten sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Anak. Sedangkan penulis hendak menganalisis terkait penanganan yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam menangani tindakan <i>bullying</i> yang terjadi pada anak.
	3. Himma Aliyah, 2017	Upaya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan n Perempuan dan Anak	1. Bagaimana proses pendampingan rehabilitasi korban perkosaan di	Fokus dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana

11

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan anak korban *bullying* oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek ?
2. Apa sajakah faktor penghambat dan upaya yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan perlindungan anak korban *bullying* oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan perlindungan anak korban *bullying* oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat dan upaya yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan perlindungan anak korban *bullying* oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memperluas ilmu pengetahuan untuk keperluan pengembangan di bidang hukum yang mengkaji Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam meningkatkan dan mengoptimalkan peranan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak mengenai penanganan tindakan *bullying* yang terjadi pada anak.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai kritik dan masukan atas pelaksanaan Peraturan

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengenai peranan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak terkait pelaksanaan penanganan tindakan *bullying* dimana anak sebagai korbannya.

- b. Bagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan dalam rangka evaluasi mengenai efektivitas peranan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak terkait pelaksanaan penanganan tindakan *bullying* dimana anak sebagai korbannya

- c. Bagi masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian Hukum Yuridis Empiris. Definisi dari penelitian hukum yuridis empiris merupakan penelitian yang dilakukan menggunakan cara mengidentifikasi hukum (*law in book*) dan melihat efektifitas pelaksanaan hukum dimasyarakat.⁹ Penelitian ini mengkaji terkait ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang sedang terjadi dalam kenyataannya. Terkait dengan penelitian ini, peneliti melakukan penelitian hukum dengan melihat dan mengidentifikasi pelaksanaan perlindungan anak korban *bullying* yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek.

⁹Burhan Ashofa, **Metode Penelitian hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm 14.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis*. Pendekatan *yuridis sosiologis* adalah merupakan pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian guna menganalisis dan memberikan jawaban atas efektivitas bekerjanya seluruh struktural hukum yang secara langsung dilaksanakan di masyarakat.¹⁰ Penggunaan pendekatan *yuridis sosiologis* dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta memberi jawaban atas permasalahan yang dibahas yaitu pelaksanaan perlindungan anak korban *bullying* yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek dengan cara turun langsung ke objek penelitiannya.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek. Pemilihan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek sebagai lokasi penelitian karena Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang berwenang serta bertanggung jawab atas penanganan tindakan *bullying* yang terjadi pada anak.

4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan 3 jenis data ialah data primer yang memiliki kekuatan yang mengikat yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, atau literatur lain yang

¹⁰Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm.

mendukung penelitian ini. Data tersier yang memberi pemahaman dan pengertian terkait data-data yang lainnya.

1. Data Primer adalah merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu hasil wawancara dari pihak terkait. Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh penulis langsung melalui penelitian di lapangan yaitu dari bagian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berkorelasi langsung dengan pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait penanganan tindakan *bullying* yang terjadi pada anak.

2. Data Sekunder adalah merupakan data-data yang erat kaitannya dengan data primer dan dapat digunakan dalam membantu menganalisis dan memahami data primer¹¹ yang berwujud:

- Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak
- Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 59 Tahun 2013 tentang Bentuk-Bentuk Perlindungan Anak dan Mekanisme Pengarustamaan Hak-Hak Anak
- Dokumen-dokumen lainnya yang mendukung penilitian ini.

3. Data Tersier adalah bahan—bahan yang memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder.Adapun data tersier yang digunakan dalam penilitian ini yaitu KBBi dan Kamus hukum.

¹¹M. Syamsudin, **Operasionalisasi Penelitian Hukum**, Raja Grafindo,Jakarta, 2007, hlm. 96.

5. Populasi, Sempel dan Teknik Pengambilan Sempel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari obyek penelitian yang memiliki kesamaan, meliputi himpunan dari orang dan atau benda, kejadian, kasus-kasus, yang dapat dibatasi pada periode dan lokasi tertentu.¹² Populasi dalam penelitian ini ialah :

1. Seluruh Pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek;
2. Seluruh Masyarakat Kabupaten Trenggalek.

b. Sempel

Sempel adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah teknik penentuan sampel Non Random atau purposive sampel yaitu menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian. Di studi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek ini, penulis mengambil sampel yaitu :

1. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek Ibu Ratri Purwa N. dan Ibu Endang Purwani, S.H.
2. 113 masyarakat Kabupaten Trenggalek yang berasal dari 14 Kecamatan yang ada di Kabupaten Trenggalek dengan rentang usia 20-49 tahun (lampiran 1).

c. Instrumen penelitian,

Bagian ini menjelaskan mengenai alat pengumpulan data yang disesuaikan dengan jenis penelitian yaitu Undang-

¹² Universitas Brawijaya, 2015, **Pedoman Penulisan Karya Ilmiah**, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang

Undang, buku, dan jurnal. Instrumen adalah peneliti itu sendiri.

Alat pengumpulan data tersebut dapat berupa :

1. *Interview guide* (pedoman wawancara) adalah alat yang berfungsi dalam melakukan wawancara dan dijadikan dasar untuk mendapatkan informasi dari responden yang berupa pertanyaan.
2. Buku catatan berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data
3. Kamera berfungsi untuk memotret jika peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan responden.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses penelitian ini,data yang digunakan didapatkan dari berbagai literatur buku cetak dan artikel dari internet yang berkaitan dengan masalah yang diambil.

Dalam pengumpulan data ini, data yang akan dikumpulkan yaitu data kualitatif. Data tersebut bersumber dari data primer yang didapat dari hasil wawancara responden dan data sekunder yang digunakan sebagai data pendukung data primer yang berasal dari Undang-Undang, literatur (buku cetak) dan jurnal yang relevan.

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang disertai dengan maksud tertentu.¹³ Sedangkan jenis pedoman wawancara yang digunakan oleh penulis yaitu jenis pedoman wawancara tidak terstruktur artinya pedoman wawancara hanya memuat pokok-pokok pertanyaan yang akan diajukan.¹⁴

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan bukti yang dapat berupa naskah-naskah yang valid yang berada di lokasi penelitian.Dokumen tertulismerupakan sumber

¹³Lexy J Maleong, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, RemajaRosdakarya,Bandung, 2011, hlm. 135.

¹⁴Suharsimi Arikunto, **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek**,Rineke Cipta,Jakarta, 2002, hlm. 202.

data yang memiliki kedudukan penting dalam penelitian kualitatif.

7. Teknik Analisis Data

Seluruh data yang telah terkumpul, berupa data primer, data sekunder dan data tersier selanjutnya akan dianalisa sehingga menghasilkan deskripsi yang akan mudah dipahami.

Dimana teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dimana data yang digunakan diperoleh dari apa yang telah dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta perilaku nyata.¹⁵

Untuk menganalisis data yang sudah terkumpul agar mendapat hasil yang mudah dipahami maka teknik yang akan digunakan yaitu:

1. Mengumpulkan data merupakan suatu cara untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai objek penelitian yang digunakan dalam proses penarikan kesimpulan dari penelitian ini.
2. Reduksi data dimana proses tersebut dilakukan setelah semua data terkumpul dan penulis akan memilih mana data yang sesuai dengan penelitian mana data yang tidak sesuai dan tidak akan dipakai. Sehingga dapat ditemukan kejelasan pada masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
3. Analisis Data adalah upaya pengolahan data yang telah dikumpulkan dan direduksi sehingga menjadi informasi data yang dapat dengan mudah dimengerti dan dapat dimanfaatkan dalam penelitian.
4. Penarikan Kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam proses menganalisis data yang diambil dari reduksi data dengan meninjau kembali reduksi data sehingga terbentuk penegasan kesimpulan.

¹⁵ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 2012, hlm. 32.

8. Definisi Operasional

a. Pelaksanaan

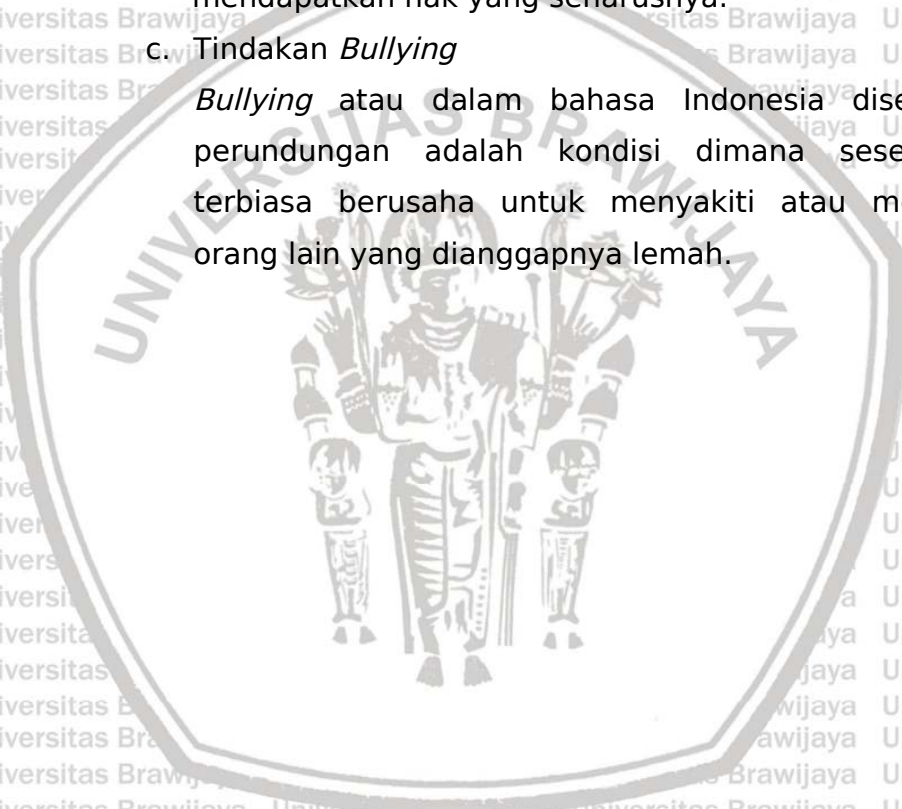
Pelaksanaan adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.

b. Perlindungan Hak Anak

Perlindungan Hak Anak adalah memberi tempat yang aman kepada anak sehingga anak dapat merasa nyaman serta aman sehingga dalam kondisiseperti itu anak dapat mendapatkan hak yang seharusnya.

c. Tindakan *Bullying*

Bullying atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan perundungan adalah kondisi dimana seseorang yang terbiasa berusaha untuk menyakiti atau mengintimidasi orang lain yang dianggapnya lemah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pelaksanaan memiliki pengertian yaitu proses, cara, perbuatan, melaksanakan terkait rancangan, keputusan dan sebagainya. Browne dan Wildvsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan¹⁶. Menurut Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, pelaksanaan merupakan upaya yang dilakukan agar pegawai atau anggota suatu organisasi mempunyai keinginan dan usaha untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan.¹⁷

Pelaksanaan kebijakan merupakan kegiatan lanjutan dari proses perumusan dan penetapan kebijakan, sehingga pelaksanaan kebijakan dapat dimaknai sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan, baik oleh individu maupun kelompok pemerintah, yang diorientasikan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan¹⁸. Dasar dari pelaksanaan dari suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sesuai dan sejalan dengan kondisi di lapang maupun di luar lapang.

2. Tinjauan Umum Tentang Fungsi Perlindungan Hukum

¹⁶ Nurin Usman, **Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum**, PT: Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm.70.

¹⁷ Raharjo Adisasmita, **Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm.64

¹⁸ Abdullah Ramdhani, Muhammad Ali Ramdhani, **Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik**, Jurnal Publik, Vol.11 No. 01, 2017, hlm.4.

Hubungan antar subyek hukum yang meliputi warga dengan pemerintah diatur oleh hukum administrasi negara atau hukum perdata, tergantung pada sifat dan kedudukan pemerintah ketika melaksanakan perbuatan hukum.¹⁹ Dalam setiap hubungan antar subyek hukum maka peran keberadaan hukum akan sangat dibutuhkan. Peran hukum dalam hal ini tidak hanya sebagai pengatur hak dan kewajiban juga berperan sebagai instrumen pelindung subjek hukum. Pemerintah dalam hukum administrasi sebagai kesatuan, sebagai badan yang diberi kewenangan, dengan demikian berwenang untuk menetapkan tindakan, menurut hukum administrasi, dan olehnya itu mempengaruhi keadaan atau kondisi hukum orang lain, atau untuk menjalankan tindakan hukum dari arti badan pemerintah secara hukum.²⁰ Van Vollenhoven mengartikan tindakan dalam hukum publik adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan fungsi pemerintahan.²¹ Pengertian fungsi pemerintahan terdapat pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu

Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka pemerintahan memiliki fungsi perlindungan hukum dalam pelaksanaan administrasi pemerintahannya. Pengertian perlindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berasal dari kata “lindung” yang memiliki makna yaitu tempat berlindung, hal yang memperlindungi. Sedangkan

¹⁹ Johan Jasin, **Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Perlindungan Hukum Atas Hak Anak Memperoleh Pendidikan**, Inovasi, Vol.6 No.3, 2009, Hlm.245. (hlm 242-257)

²⁰ Herman, **Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara**, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol.1 No.1, 2015, Hlm.44. (hlm 43-54)

²¹ Ibid, hlm.44

perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.²² Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa terdapat dua macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif, pada perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan dalam perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.²³

4. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)

Secara definitif “hak” merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.²⁴ Secara umum, hak dipandang memiliki struktur internal yang terdiri dari empat komponen dasar, yaitu keistimewaan (*privilege*), klaim (*claim*), kekuatan (*power*) dan kekebalan (*immunity*).²⁵

Terdapat beberapa tokoh ahli yang mengemukakan pengertian HAM, salah satunya adalah Adnan Buyung Nasution yang menjelaskan bahwa HAM adalah *inalienable rights*, yaitu hak-hak yang dengan dalih apapun tidak dapat dilenyapkan dari manusia karena dia manusia serta hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat.²⁶ Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No.39 Tahun

²² Anggun Lestari Suryamizon, **Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia**, Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender, vol.16 No.2, 2017, hlm.120. (112-126)

²³ Philipus M. Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia**, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 291-292

²⁴ Tim ICCE UIN Jakarta, **Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani**, Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm. 1999.

²⁵ Pranoto Iskandar, **Hukum HAM Internasional Sebuah Pengantar Kontekstual**, IMR Press, Cianjur, 2012, hlm. 23.

²⁶ Muhammad Ashri, **Hak Asasi Manusia Filosofi, Teori & Instrumen Dasar**, CV. Social Politic Genius (SIGn), Makassar, 2018, hlm.12.

1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan pengertian dari Hak Asasi Manusia adalah

“ Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia ”

Upaya dalam menghormati dan melindungi serta menjunjung tinggi HAM merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama antar individu, pemerintah bahkan negara. Dimana dalam pemenuhan tidak terlepas dari pelaksanaan kewajiban juga, pun dalam memenuhi kepentingan perseorangan tidak boleh mengganggu atau merusak kepentingan orang lain.

5. Tinjauan Umum Tentang Anak

Definisi dari anak dapat dilihat secara sosiologis, psikologis, dan yuridis. Secara sosiologis anak diartikan sebagai seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin sedangkan secara psikologis kriteria seseorang dianggap anak didasarkan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya sehingga dapat dikualifikasikan bahwa anak adalah seseorang yang berada pada masa bayi hingga masa remaja awal antara usia 16-17 tahun.²⁷ Selain kedua definisi tersebut juga terdapat definisi secara yuridis yang disebutkan di beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak, disebutkan bahwa kategori anak ialah berusia 12 sampai 18 tahun. Namun dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, anak adalah seseorang

²⁷Liza Agnesta Krisna, *loc. cit.*

yang belum berusia 18 tahun dan juga yang masih ada di dalam kandungan.

6. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak

Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah

“segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “perlindungan” berasal dari kata “lindung” yang berarti tempat berlindung, sedangkan kata “lindung” sendiri memiliki arti tempat yang aman. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perlindungan anak memiliki arti yaitu memberi tempat yang aman kepada anak sehingga anak dapat merasa nyaman serta aman.

7. Tinjauan Umum Tentang Tindakan *Bullying*

Bullying yang apabila didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dipadankan sebagai perundungan yang berasal dari kata “rundung” yang berarti mengganggu, mengusik terus-menerus, dan menyusahkan.²⁸ Tindakan *bullying* dapat dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu: a. *bullying* fisik terjadi ketika seseorang secara fisik dirugikan melalui tindakan; b. *bullying* verbal adalah *bullying* yang dilakukan dengan mengancam, melakukan panggilan bernada seksual, dan menyebarkan desas desus palsu atau jahat; c. *bullying* mental/psikologi adalah tindakan yang dilakukan dengan mengabaikan orang lain, mengisolasi dan membuat siswa lain

²⁸Ranny Rastati, **Bentuk Perundungan Siber di Media Sosial dan Pencegahannya Bagi Korban dan Pelaku**, Jurnal Sosioteknologi, Vol.15No.2, 2016, hlm.170

tidak menyukai seseorang²⁹. Dewasa ini semakin berkembangnya teknologi memunculkan fenomena baru mengenai tindakan *bullying* yaitu *cyber-bullying* yaitu *bullying* yang dilakukan melalui sosial media.

8. Tinjauan Umum Tentang Upaya Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif

Upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif merupakan serangkaian upaya yang dapat dilakukan untuk menapai suatu tujuan tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) promotif adalah bersifat memajukan atau meningkatkan. Upaya promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi.³⁰ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) aalah bersifat mencegah (supaya jangan terjadi apa-apa). Upaya preventif adalah suatu kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk melakukan pencegahan terhaap suatu masalah.³¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kuratif adalah dapat menolong menyembuhkan (penyakit dan sebagainya); mempunyai daya untuk mengobati. Upaya kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk penyembuhan, pengurangan akibat yang ditimbulkan dari suatu masalah yang ditimbulkan, pengendalian suatu masalah yang telah terjadi.³² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) rehabilitatif adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula); perbaikan anggota tubuh yang cacat an sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat. Upaya rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan suatu

²⁹Sufriani, Eva Purnama Sari, **Faktor Yang Mempengaruhi Bullying Pada Anak Usia Sekolah Disekolah Dasar Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh**, Idea Nursing Journal, Vol VIII No.3, 2017.

³⁰Eka Alvita Kondoy, J.H. Posumah, Very Y. Londa, **Peran Tenaga Medis Dalam Pelaksanaan Program Universal Coverage Di Puskesmas Bahu Kota Manado**, Jurnal Administrasi Publik UNSRAT, 2017, hlm.3.

³¹*Ibid*, hlm.3

³²*Ibid*, hlm 3.



kondisi yang terkeak akibat dari suatu permasalahan ke kondisi semula sehingga dapat berfungsi dengan semestinya.³³



³³*ibid*, hlm 3.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Trenggalek

a. Keadaan Geografis

Secara geografis Kabupaten Trenggalek berada diantara koordinat 111°24'-112°11' Bujur Timur dan 7°53'-8°34' Lintang Selatan. Kabupaten Trenggalek juga mempunyai wilayah kepulauan yang tersebar di Kawasan Selatan Kabupaten Trenggalek. Jumlah pulau yang berada di wilayah Kabupaten Trenggalek sebanyak 57 pulau, yang keseluruhannya masih belum berpenghuni. Pulau terluar dari wilayah Kabupaten Trenggalek adalah Pulau Panikan dan Pulau Sekel yang belum diketahui luasnya. Sedangkan luas wilayah laut (Zona Ekonomi Eksklusif) $\pm 35.558 \text{ km}^2$ termasuk 57 pulau kecil tidak berpenghuni.

Kabupaten Trenggalek terdiri dari 14 kecamatan, 152 desa dan 5 kelurahan, 555 dusun/lingkungan, 1.287 rukun warga dan 4.490 rukun tetangga. Dari 14 kecamatan hanya 5 kecamatan yang mayoritas desanya berupa dataran, yaitu Kecamatan Trenggalek, Kecamatan Karangn, Kecamatan Pogalan, Kecamatan Tugu dan Kecamatan Durenan. Sedangkan 9 kecamatan lainnya mayoritas desanya berupa pegunungan.

b. Keadaan Topografi

Kabupaten Trenggalek secara ketinggian tempat terdiri dari 2/3 wilayah pegunungan dan 1/3 lainnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0 sampai 690 meter di atas permukaan air laut. Dua pertiga wilayah Kabupaten Trenggalek yang merupakan kawasan pegunungan dataran rendah memiliki ketinggian antara 0 hingga di atas 100 meter di atas permukaan laut, dan ketinggian tersebut

53,8% berketinggian 100-500m. Kabupaten Trenggalek sebagian besar bertopografi terjal lebih dari 40% seluas ± 28.378 ha yang merupakan daerah rawan bencana longsor. Sebagian besar lahan ini merupakan lahan kritis yang rentan mengalami gerakan tanah. Kawasan ini tersebar di beberapa kecamatan diantaranya Kecamatan Bendungan, Pule, Dongko, Watulimo, Munjungan dan Kecamatan Panggul. Luas dataran rendah dengan tingkat kemiringan antara 0-15% adalah ± 42.291 ha.

Kawasan yang bertopografi datar sebagian besar terletak di Kabupaten Trenggalek bagian utara meliputi Kecamatan Trenggalek, Karangan, Pogalan, Durenan, dan Tugu. Kondisi kelerengan lahan di Kabupaten Trenggalek dapat diuraikan bahwa terdapat kondisi yang variatif dari datar hingga sangat curam, yaitu dengan kemiringan tanah 0%-7% untuk wilayah dataran rendah dan 7-40% untuk wilayah pegunungan.

c. Keadaan Demografi

Menurut data Badan Pusat Statistika (BPS) Kabupaten Trenggalek hasil dari registrasi penduduk akhir tahun 2011 sebesar 813.418 jiwa. Dari jumlah seluruh penduduk tersebut sebanyak 50,52% merupakan penduduk laki-laki. Potensi sumber daya manusia dalam satu daerah juga dapat diketahui melalui indikator jumlah penduduk berusia produktif (15-64 tahun). Berdasarkan data BPS, dalam tahun 2011, tercatat sebesar 435.917 jiwa termasuk dalam usia produktif dan sebesar 213.966 jiwa termasuk usia tidak produktif sehingga menghasilkan angka dependency ratio sebesar 49. Hal ini berarti setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 49 jiwa penduduk yang tidak produktif.

Jumlah penduduk mengandung dua konsekuensi bila dikaitkan dengan pembangunan, yaitu menjadi subyek dan obyek pembangunan. Sehingga, dalam banyak hal besarnya

penduduk merupakan potensi dan modal dasar pembangunan apabila peranan keduanya bisa diwujudkan. Kabupaten Trenggalek dengan luas wilayahnya 1.216,40 km² pada tahun 2011 menurut hasil registrasi penduduk akhir tahun sebesar 813.418 jiwa. Dari jumlah seluruh penduduk tersebut sebanyak 49,85% merupakan penduduk laki-laki dan 50,15% penduduk perempuan.

d. Visi dan Misi Kabupaten Trenggalek

Visi :

Terwujudnya Kabupaten Trenggalek yang maju, adil, sejahtera, berkepribadian, berlandaskan Iman dan Takwa

Misi :

1. Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, kompeten dan profesional, demi pembangunan yang efektif dan efisien, serta pelayanan prima kepada masyarakat dalam pelayanan dasar khususnya kesehatan dan pendidikan.
2. Meningkatkan pembangunan sektor pertanian serta sektor produktif lain, melalui peningkatan produktivitas berbasis teknologi tepat guna dan akses terhadap sarana produksi, serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat untuk mewujudkan tata niaga yang adil dan menyejahterakan.
3. Mewujudkan peningkatan perluasan layanan infrastruktur transportasi dari skala regional hingga tingkat desa, infrastruktur pertanian, infrastruktur lain, termasuk yang menunjang pengembangan pariwisata dan kawasan selatan Trenggalek.
4. Meningkatkan penciptaan lapangan kerja bagi SDM terdidik di sektor pertanian dan sektor produktif lain serta meningkatkan daya tarik investasi industri dengan memperhatikan kelestarian alam, ekonomi kerakyatan dan tatanan sosial masyarakat

2. Gambaran Umum Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek

a. Letak Kantor

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek terletak di Jambangan, Sumbergedong, Kec. Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur.

b. Visi dan Misi

Visi

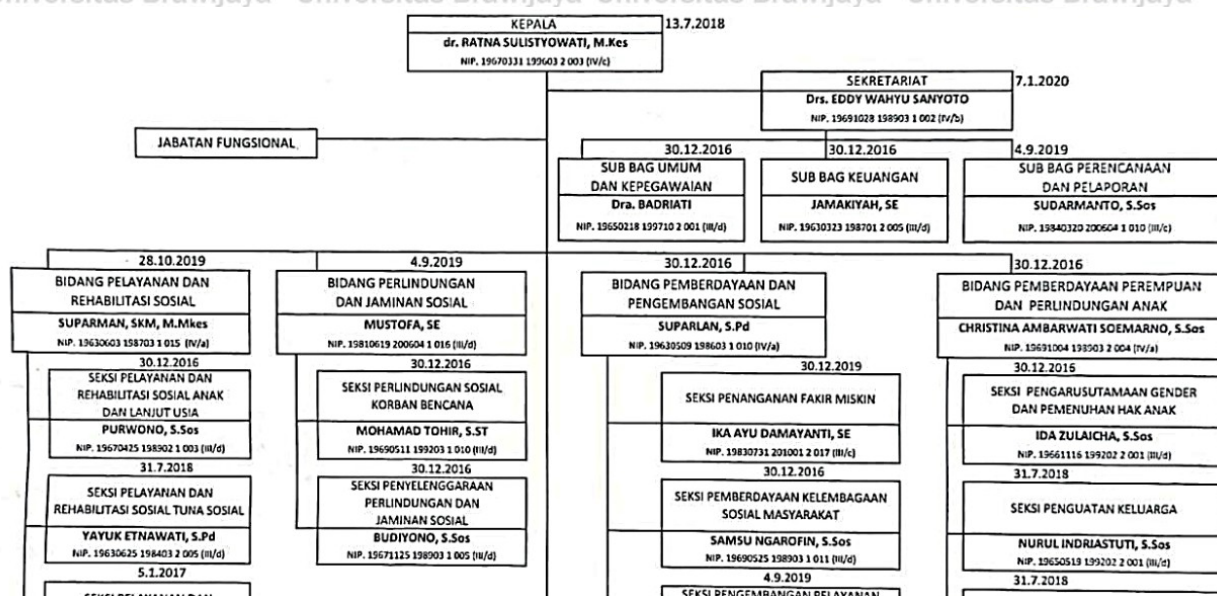
Terwujudnya Kesejahteraan Sosial, Perlindungan dan Pemberdayaan terhadap Perempuan dan Anak, Kesetaraan Gender dan Terpenuhinya Hak Anak

Misi

1. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui peningkatan pembangunan, pembinaan bimbingan usaha-usaha kesejahteraan sosial, kesadaran rasa tanggungjawab sosial masyarakat, pengamanan dan pengawasan pelaksanaan usaha untuk kesejahteraan sosial dan rehabilitasi sosial.
2. Meningkatkan kualitas hidup perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak di Kabupaten Trenggalek.

c. Struktur Organisasi

Bagan 1.1



Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek

Sumber : *Data Sekunder, tanpa diolah, 2021*

d. Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek sesuai dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah adalah sebagai berikut.

1. Tugas³⁴

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

2. Fungsi³⁵

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

- a.) Penyusunan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b.) Penyusunan perencanaan program dan anggaran urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c.) Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d.) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

³⁴Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah, Pasal 160 Ayat 1 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 35)

³⁵Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah, Pasal 160 Ayat 2 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 35)

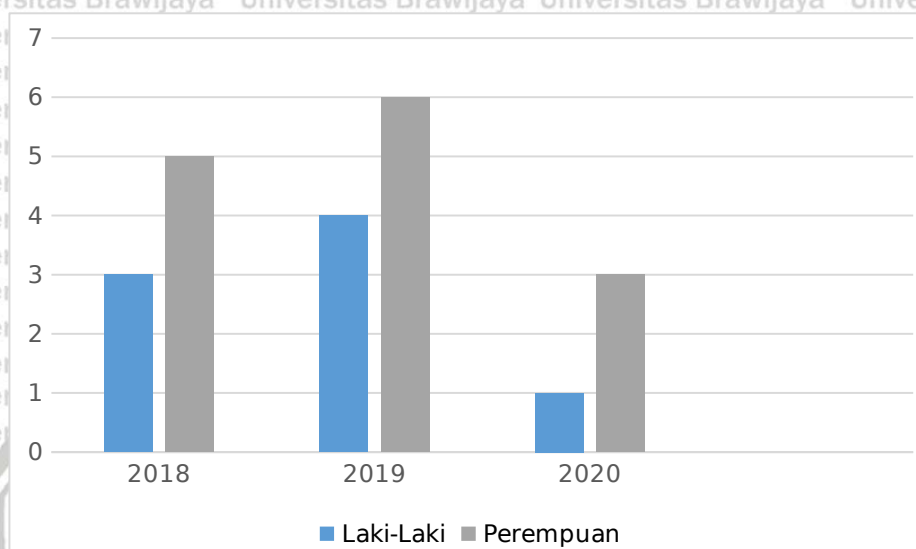
- e.) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f.) Pembinaan penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- g.) Pembinaan UPTD;
- h.) Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- i.) Penyusunan perjanjian kerja;
- j.) Penetapan dan pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
- k.) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara periodik;
- l.) Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- m.) Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- n.) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- o.) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Pelaksanaan Perlindungan Anak Korban *Bullying* Oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek memiliki wewenang untuk melaksanakan perlindungan terhadap hak anak, salah satunya adalah hak anak yang bebas dalam segala hal tidak diskriminasi dalam bentuk apapun termasuk tindakan *bullying*. Di Trenggalek sendiri masih banyak dijumpai kasus *bullying* yang terjadi pada anak. Menurut data dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek tahun 2018-2020 terdapat 22 kasus *bullying* yang terjadi pada anak. Data tersebut dapat dilihat dalam bentuk grafik di bawah ini.

Grafik 1.1
Data Anak Korban Bullying



Sumber : *Data Sekunder, diolah, 2021*

Suatu tindakan dapat dikatakan sebagai suatu tindakan *bullying* dikategorikan menjadi 6 jenis yaitu:³⁶

a. Kontak Fisik Langsung

Tindakan-tindakan yang termasuk kontak fisik langsung adalah tindakan mendorong, menjambak mengunci orang dalam ruangan, mencakar, memukul, menggigit, menendang, mencubit, serta merusak barang milik orang lain dan memeras.

b. Kontak Fisik Tidak Langsung

Tindakan-tindakan yang termasuk kontak fisik tidak langsung adalah tindakan mempermalukan, mengganggu, sarkasme, merendahkan, mengintimidasi, menyebarkan gosip, mengancam, memberi panggilan nama, mencela, memaki, mengejek.

c. Kontak Non-fisik Langsung

³⁶Data Primer, Wawancara Ibu Ratri Purwa N. (bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek pada 18 Januari 2021.

Tindakan-tindakan yang termasuk kontak non-fisik langsung adalah tindakan menjulurkan lidah, mengejek, melihat dengan sinis, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan. Biasanya tindakan-tindakan tersebut disertai dengan *bullying*

yang termasuk kategori kontak fisik.

d. Kontak Non-fisik Tidak Langsung

Tindakan-tindakan yang termasuk kontak non-fisik tidak langsung adalah tindakan memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, mengirimkan surat kaleng, mendiamkan seseorang, sengaja menguikikan atau mengabaikan.

e. *Cyber Bullying*

Tindakan *cyber bullying* merupakan tindakan *bullying* yang dilakukan melalui sarana media elektronik seperti melakukan pencemaran nama di media sosial dan mengunggah rekaman video yang tidak seharusnya menjadi konsumsi publik.

f. Pelecehan Seksual

Tindakan pelecehan seksual adalah merupakan perilaku yang lebih agresif dalam tindakan *bullying* yang merupakan kelanjutan dari kontak fisik.

Pelaksanaan perlindungan anak korban *bullying* dinas sosial dapat melakukan upaya-upaya yang telah ditentukan dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Upaya-upaya tersebut diantaranya adalah promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif yang dapat diwujudkan dalam berbagai kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut juga telah selaras dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang dimiliki oleh Kabupaten Trenggalek yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 59 Tahun 2013 tentang Bentuk-Bentuk Perlindungan Anak dan Mekanisme

Pengarustamaan Hak-Hak Anak. Dari dasar berbagai peraturan tersebut maka dibuatlah Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek dalam pelaksanaan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan anak korban *bullying*.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dimilikinya. Salah satunya dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelaksanaan perlindungan anak korban *bullying*, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibantu oleh beberapa UPTnya diantaranya PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) dan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak).

1. PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga)³⁷

- a. Ruang Lingkup PUSPAGA :
Pelayanan pengasuhan anak berbasis hak anak, sehingga perlindungan dan pemenuhan hak anak dapat tercapai. PUSPAGA sebagai layanan preventif, promotif serta pemberian layanan rujukan.
- b. Prinsip-prinsip pembentukan PUSPAGA :
 - 1. Non-diskriminasi
 - 2. Kepentingan terbaik bagi anak
 - 3. Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
 - 4. Menghargai pandangan anak
 - 5. Mudah di akses
- c. Tujuan Pembentukan Puspaga
 - 1. Memberikan “pelayanan satu pintu”, yaitu pelayanan keluarga satu atap, menyeluruh, dan terpadu berdasarkan hak-hak anak.
 - 2. Menyediakan wadah pendidikan orang tua-anak bagi orang tua, calon orang tua dan penanggung jawab anaknya.

³⁷Data Sekunder, Prosedur Standar Operasional Pusat Pembelajaran Keluarga, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016

3. Menyediakan tempat konseling dan konseling bagi anak, orang tua dan penanggung jawab anak.

4. Memberikan contact point sebagai solusi permasalahan anak dan keluarga.

5. Memperkuat kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak.

6. Memperkuat sinergi antara pusat dan kabupaten dalam pelaksanaan hak-hak anak, khususnya dalam pembelajaran keluarga.

d. Pengaduan yang mendapatkan layanan dari PUSPAGA adalah sebagai berikut :

1. Anak
2. Orangtua/ Wali
3. Calon Orangtua/ Wali
4. Guru/ Pengurus Panti/ semua stake holder yan terkait dengan anak
5. Masyarakat/ keluarga yang ingin mendapatkan informasi terkait layanan pengasuhan dan konseling berbasis hak anak

2. **P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak)³⁸**

a. Ruang Lingkup P2TP2A

Penanganan masalah perempuan dan anak meliputi 5 (lima) jenis pelayanan yaitu :

1. Penjangkauan;
2. Identifikasi kondisi dan layanan yang dibutuhkan;
3. Perlindungan terhadap perempuan dan anak di lokasi kejadian (pertolongan darurat);
4. Penempatan dan pengungsian perempuan dan anak mengalami permasalahan; dan
5. Rujukan dan/atau rekomendasi

b. Prinsip-Prinsip Pembentukan P2TP2A

1. Non-diskriminasi

³⁸Data Sekunder, Prosedur Standar Operasional Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak, 2016

2. Hubungan setara dan menghormati
3. Menjaga privasi dan kerahasiaan
4. Memberi rasa aman dan nyaman
5. Menghargai perbedaan individu
6. Tidak menghakimi
7. Menghormati pilihan dan keputusan korban
8. Menggunakan bahasa sederhana dan dapat dimengerti
9. Empati

c. Tujuan Pembentukan P2TP2A

1. Untuk melihat dan memastikan kondisi korban yang sebenarnya sebelum diberikan layanan yang dibutuhkan;
2. Pemberian perlindungan dan bantuan darurat kepada korban;
3. Pemberian rekomendasi untuk memberikan layanan lanjutan kepada korban.

Bentuk-bentuk pelaksanaan perlindungan anak korban *bullying* yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek yang dibantu oleh UPT-UPT nya diantaranya adalah sebagai berikut:³⁹

1. Pelaksanaan Perlindungan Promotif dan Preventif

Pelaksanaan perlindungan yang pertama dan kedua yang disebutkan dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu dalam bentuk upaya promotif dan preventif. Kedua upaya ini berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ratri Purwa N. Dari bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek merupakan upaya yang bersifat pencegahan serta lebih mengutamakan

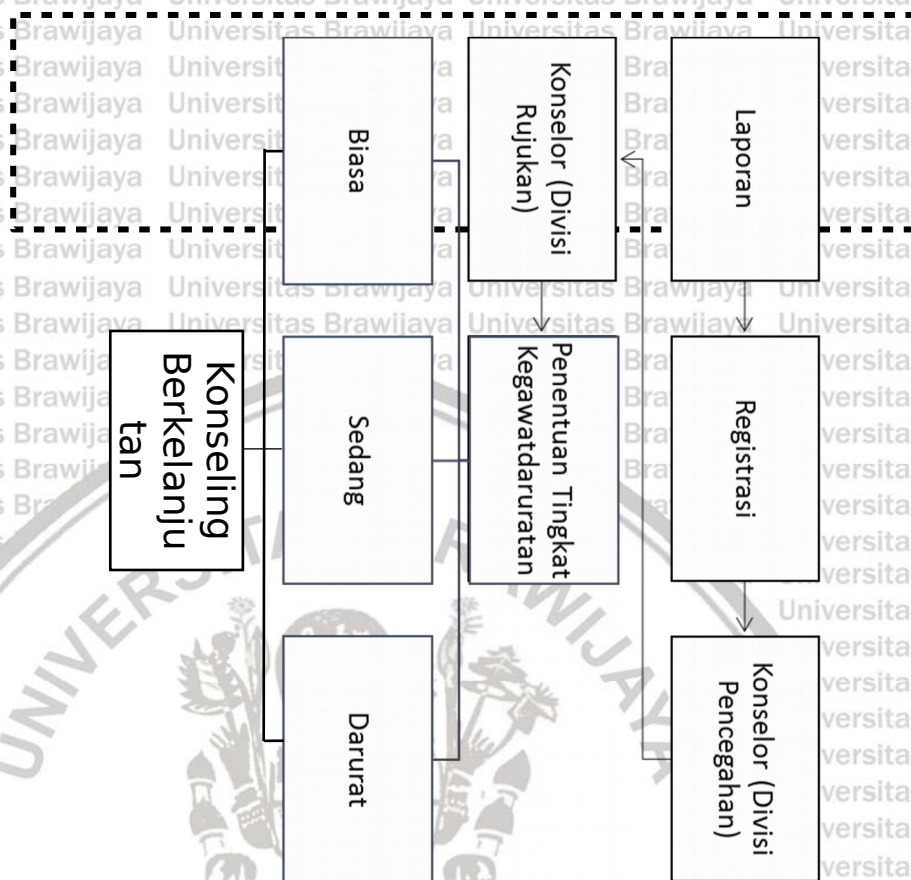
³⁹Data Sekunder, Standar Operasional Prosedur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek.

menggunakan cara promosi dan komunikasi. Hal tersebut selaras dengan Pasal 4 ayat (2) PERBUP Trenggalek Nomor 59 Tahun 2013 terkait bentuk-bentuk perlindungan anak yang dapat dilakukan dengan cara advokasi dan promosi serta komunikasi, informasi serta edukasi, dimana dalam Pasal 6 dan Pasal 7 pada peraturan yang sama dijelaskan bahwa “advokasi dan promosi serta komunikasi, informasi dan edukasi dapat dilakukan dengan cara sosialisasi atau pemberian pertimbangan pada pengambil kebijakan secara langsung maupun tidak langsung”. Maka dalam mewujudkan upaya ini Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek dilakukan melalui komunikasi, edukasi dan informasi melalui PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) baik dengan cara *online* maupun *offline*. Komunikasi dan edukasi yang diberikan oleh PUSPAGA dalam bentuk *offline* berupa pemberian dan pengadaan seminar serta sosialisasi mengenai layanan PUSPAGA yang dikaitkan dengan tema tertentu kepada organisasi-organisasi masyarakat atau lembaga-lembaga pemerintahan lainnya. Kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan antara lain adalah:⁴⁰

1. Pemberian sosialisasi terkait edaran Bupati Trenggalek terkait pencegahan perkawinan usia anak dengan mengundang *stake holder* terkait.
 2. Diadakannya kunjungan oleh sekolah-sekolah salah satunya TK PAUD Aisyiyah Surondakan ke Rumah Perempuan Kabupaten Trenggalek dibawah naungan PUSPAGA Kabupaten Trenggalek dengan memberikan edukasi terkait kekerasan pada anak.
 3. Menjadi pengisi materi dalam kegiatan LDK pengurus OSIS dan MPK SMAN 2 Trenggalek terkait sekolah ramah anak.
- Identifikasi kegiatan layanan respon dan rujukan kasus oleh PUSPAGA :

⁴⁰Data Primer, Wawancara Ibu Ratri Purwa N. (bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek pada 18 Januari 2021.

Bagan 1.2
Layanan Respon Kasus oleh PUSPAGA



Sumber : *Data Sekunder, diolah, 2021*

1. Penerimaan laporan dari anak atau orang tua atau pihak masyarakat atau rujukan pelaporan anak dilakukan oleh petugas administrasi;
2. Petugas administrasi melakukan registrasi klien dan melakukan pencatatan kronologis;
3. Petugas admin melaporkan kepada konselor (divisi pencegahan) dengan menyerahkan form registrasi layanan informasi dan konseling pengasuhan;
4. Divisi pencegahan menentukan tindakan atau kegiatan apa yang sesuai dengan kondisi yang dilaporkan.

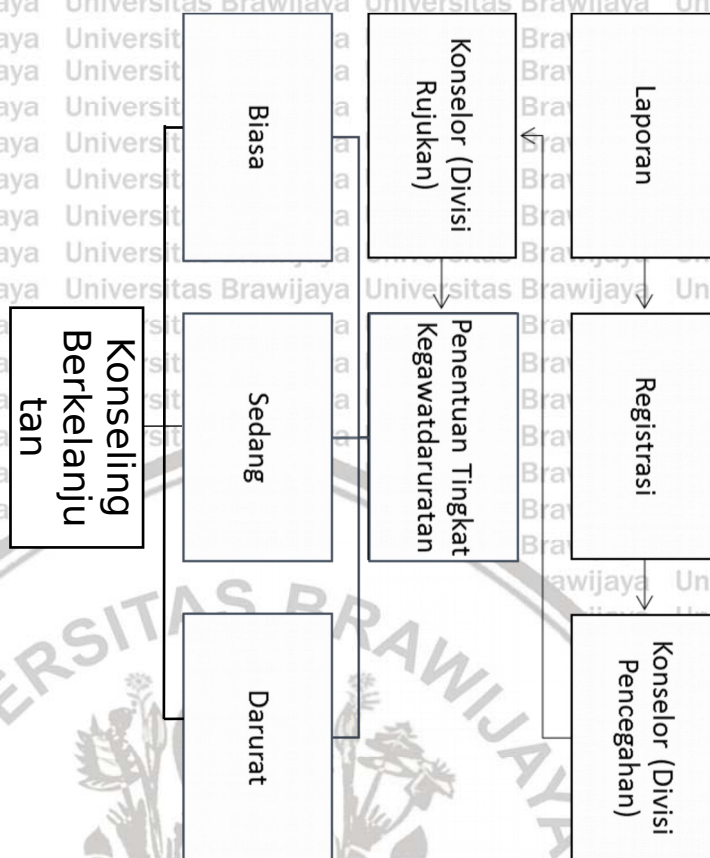
2. Pelaksanaan Perlindungan Kuratif

Pelaksanaan perlindungan yang ketiga yang disebutkan dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu dalam bentuk upaya kuratif. Upaya kuratif merupakan upaya lanjutan dari upaya promotif dan preventif. Dari hasil wawancara oleh Ibu Ratri Purwa N. Dari bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek pelaksanaan perlindungan dalam bentuk upaya kuratif Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek dilakukan dengan memberikan konseling individu maupun kelompok kepada individu maupun keluarga dan apabila jika membutuhkan penanganan lanjutan akan dirujuk kepada tenaga ahli yang lainnya yaitu psikolog dan psikiater.

Bentuk kegiatan dari upaya ini telah diatur dalam Pasal 63 Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak yang mengatur mengenai bentuk-bentuk upaya perlindungan terhadap korban dilakukan dengan melaksanakan pelayanan psikososial, pelayanan pendampingan dan pelayanan pemulihan korban. Oleh karena itu, bentuk kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah memberikan penyuluhan dan pendampingan kepada seluruh anak korban bullying yang diterima Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak dilakukan oleh PUSPAGA (Pusat Belajar Keluarga) yang merupakan salah satu UPT (Unit Pelaksana Teknis) milik Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek. Langkah-langkah pemberian konseling tersebut dilakukan sesuai dengan SOP yang telah dimiliki oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek sebagai berikut :



Bagan 1.3



Layanan Konseling oleh PUSPAGA Terhadap Anak Korban Bullying

Sumber : *Data Sekunder, diolah, 2021*

1. Jika ditemui masalah pada sesi konseling dalam tingkat preventif maka konselor (divisi pencegahan) merujuk kepada konselor (divisi rujukan);
2. Konselor (divisi rujukan) melakukan pendataan dan assesmen awal identitas anak, keluarga dan kebutuhan layanan;
3. Menentukan tingkat kegawatdaruratan klien berdasarkan assesmen;
4. Jika kondisi klien biasa dan bisa menunggu (*low*) maka diberikan layanan sesuai kebutuhan atau layanan informasi dan konseling;

5. Jika kondisi klien sedang dan perlu untuk ditangani oleh ahli, maka diberikan layanan rujukan ahli/sesuai kebutuhan;
6. Jika kondisi klien darurat dan membutuhkan layanan segera maka diberikan layanan rujukan darurat sesuai kebutuhan;
7. Jika dibutuhkan konseling keluarga berkelanjutan maka dilakukan sampai terminasi;
8. Layanan selesai.

3. Pelaksanaan Perlindungan Rehabilitatif

Pelaksanaan perlindungan yang keempat yang disebutkan dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu diwujudkan dalam bentuk upaya rehabilitatif. Bentuk dari upaya ini juga terdapat pada Pasal 63 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak, didalam pasal tersebut disebutkan dalam huruf e bahwa dalam melaksanakan upaya perlindungan korban dapat dilakukan dengan melaksanakan mekanisme pelayanan medis, pelayanan hukum serta pelayanan bimbingan rohani dan dalam huruf g dengan memberikan fasilitas resosialisasi korban yang bertujuan agar korban dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat. Untuk melaksanakan kegiatan sedemikian rupa maka dalam Pasal 63 ayat (1) huruf d disebutkan bahwa dilakukan dengan membentuk kelembagaan sebagai wadah kerjasama perlindungan dan pemulihan korban.

Dilaksanakannya upaya rehabilitatif merupakan salah satu pemenuhan hak korban sebagaimana yang tertera dalam Pasal 59 Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak. Sesuai dengan pasal tersebut maka terdapat beberapa kegiatan yang dapat dilakukan untuk melaksanakan upaya perlindungan anak korban *bullying* diatas

maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek mengelompokkan menjadi 3 jenis kegiatan rehabilitasi yang dapat dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan anak yang menjadi korban *bullying*, yaitu :

i. Pelayanan Rehabilitasi Kesehatan

Pelayanan rehabilitasi kesehatan ini disebutkan dalam Pasal 59 huruf g terkait hak korban kekerasan dalam hal ini tindakan *bullying* yaitu memperoleh rehabilitasi kesehatan. Pelayanan rehabilitasi kesehatan adalah pelayanan pemulihan kesehatan bagi saksi dan/atau korban dari gangguan kesehatan yang dideritanya baik fisik maupun psikis yang dilaksanakan secara komprehensif dilakukan melalui pelayanan kesehatan tingkat dasar di Puskesmas dan pelayanan rujukan di Rumah Sakit Pemerintah dan/atau swasta termasuk pelayanan rujukan lanjutan, yang dilayani di :

- Pusat Krisis Terpadu di Rumah Sakit Dr. Soedomo (Jl. Dr. Soetomo Nomor 2 Trenggalek Telp. 0355-793110)
- Pusat Krisis Terpadu pada Puskesmas se Kabupaten Trenggalek

Pelayanan rehabilitasi kesehatan ini diawali dengan diterimanya laporan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau melalui PUSPAGA. Kemudian laporan tersebut diteruskan kepada konselor yang disediakan oleh PUSPAGA untuk mengetahui dan menentukan bentuk rehabilitasi yang dibutuhkan oleh anak yang merupakan korban. Dari identifikasi tersebut maka akan diberi rujukan oleh konselor kepada pihak penyedia rehabilitasi kesehatan, dalam hal ini yaitu pusat krisis terpadu yang terdapat di RSUD Kabupaten Trenggalek dan/atau seluruh PUSKESMAS se Kabupaten Trenggalek.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ratri Purwa N. Dari bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek pemberian rehabilitasi kesehatan berupa pemulihan fisik dan psikis dengan disertai penanganan medis yaitu dengan pemberian obat-obatan medis. Dari data kasus *bullying* tahun 2018-2020 terdapat 2 orang anak yang mendapat rehabilitasi kesehatan dengan pemberian rujukan ke RSUD Kabupaten Trenggalek dan diteruskan ke PUSKESMAS kecamatan tempat tinggal anak untuk melaksanakan pendampingan bersama dengan PUSPAGA.

ii. Pelayanan Bantuan Hukum

a. Pengertian

Pelayanan bantuan hukum ini disebutkan dalam Pasal 59 huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak terkait hak korban kekerasan yaitu

memperoleh perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/atau hartanya baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara dari pihak kepolisian.

Pelayanan bantuan hukum adalah serangkaian kegiatan penanganan dan perlindungan di bidang hukum bagi saksi dan/atau korban, mulai dari tingkat penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian, penuntutan di Kejaksaan, proses pemeriksaan di sidang Pengadilan sampai adanya kepastian hukum serta pengawalan restitusi dalam rangka pemenuhan hak asasi korban dan/atau saksi yang dilakukan secara terintegrasi dengan pelayanan lainnya. Tempat layanan adalah : Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Kabupaten Trenggalek.

b. Penerima layanan

1. Anak yang berhadapan dengan hukum (anak korban, anak saksi dan anak pelaku)
2. Perempuan korban kekerasan rumah tangga

3. Perempuan korban tindak pidana perdagangan orang

c. Identifikasi kegiatan

1. Bantuan hukum dalam proses pelaporan dan pembuatan BAP

2. Bantuan hukum dalam proses penuntutan di Kejaksaan

3. Bantuan hukum dalam proses pemeriksaan di Pengadilan

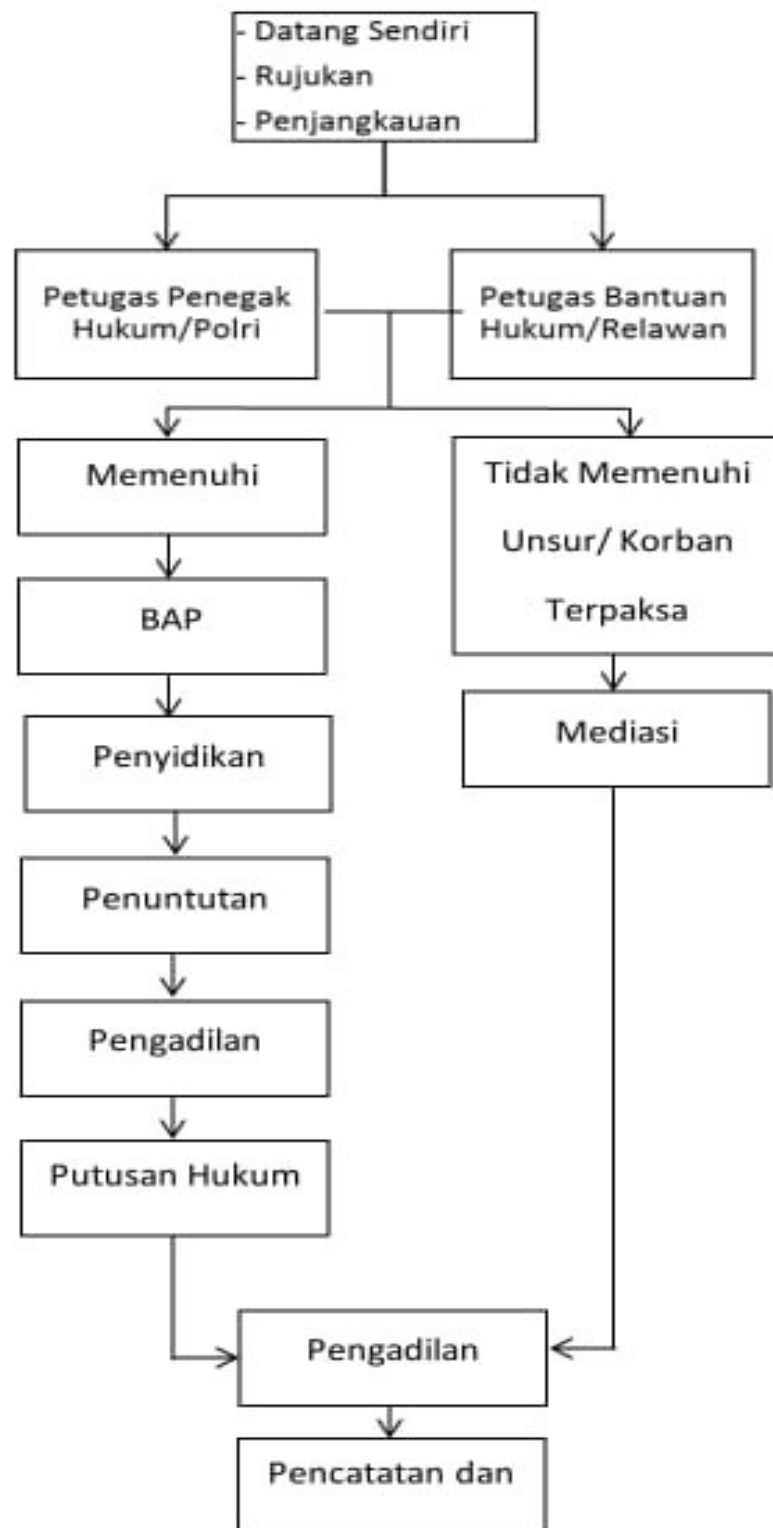
4. Bantuan hukum dalam proses keputusan sidang Pengadilan hingga adanya keputusan hukum

5. Bantuan hukum dalam proses mediasi

6. Bantuan hukum non litigasi



Bagan 1.4
Langkah Pelayanan Bantuan Hukum



Sumber : *Data Sekunder, diolah, 2021*

- d. Langkah-langkah pelayanan bantuan hukum
 1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau petugas PUSPAGA menerima laporan;
 2. Petugas meminta informasi yang berkaitan dengan fakta hukum, barang bukti;
 3. Membantu klien menyiapkan kronologi kejadian, identifikasi saksi dan barang bukti;
 4. Melaksanakan pendampingan pelaporan di Kepolisian;
 5. Mendampingi korban pada pembuatan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
 6. Meminta SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) kepada Kepolisian;
 7. Meminta tanda bukti laporan polisi (LP);
 8. Membantu klien untuk mengajukan permohonan ganti rugi atas kerugian yang dialami;
 9. Petugas meminta kepolisian untuk mengajukan perintah perlindungan kepada Ketua Pengadilan untuk Klien;
 10. Melaksanakan pendampingan dalam proses penuntutan;
 11. Petugas mencari informasi mengenai Jaksa Penuntut Umum yang mewakili kepentingan korban di persidangan;
 12. Petugas memantau perkara yang ditangani oleh Jaksa Penuntut Umum;
 13. Petugas membantu klien untuk meminta Jaksa Penuntut Umum berkas pemeriksaan klien untuk dapat dibaca kembali sebagai persiapan kesaksian di Pengadilan;
 14. Petugas menyiapkan korban untuk memasuki proses pengadilan;
 15. Petugas menyiapkan surat tugas untuk melakukan pendampingan dalam sidang pengadilan;

16. Petugas mendampingi korban di Pengadilan;
17. Petugas mendampingi korban untuk berkoordinasi dengan Jaksa Penuntun Umum dalam mengajukan banding, kasasi, atau bahkan Peninjauan Kembali (PK) hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
18. Bila diperlukan petugas dapat melakukan pendampingan proses perundingan diluar pengadilan.

Menurut data yang dimiliki oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek belum ada kasus tindakan *bullying* pada anak yang dibutuhkan bantuan pelayanan hukum. Sehingga pelayanan bantuan hukum yang dimiliki oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek ini belum pernah dilakukan dalam kasus anak korban *bullying*.

iii. Pelayanan Rehabilitasi Sosial

a. Pengertian

Pelayanan ini disebutkan dalam Pasal 59 huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak terkait hak korban kekerasan yaitu memperoleh rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi social apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis.

Rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

b. Ruang Lingkup

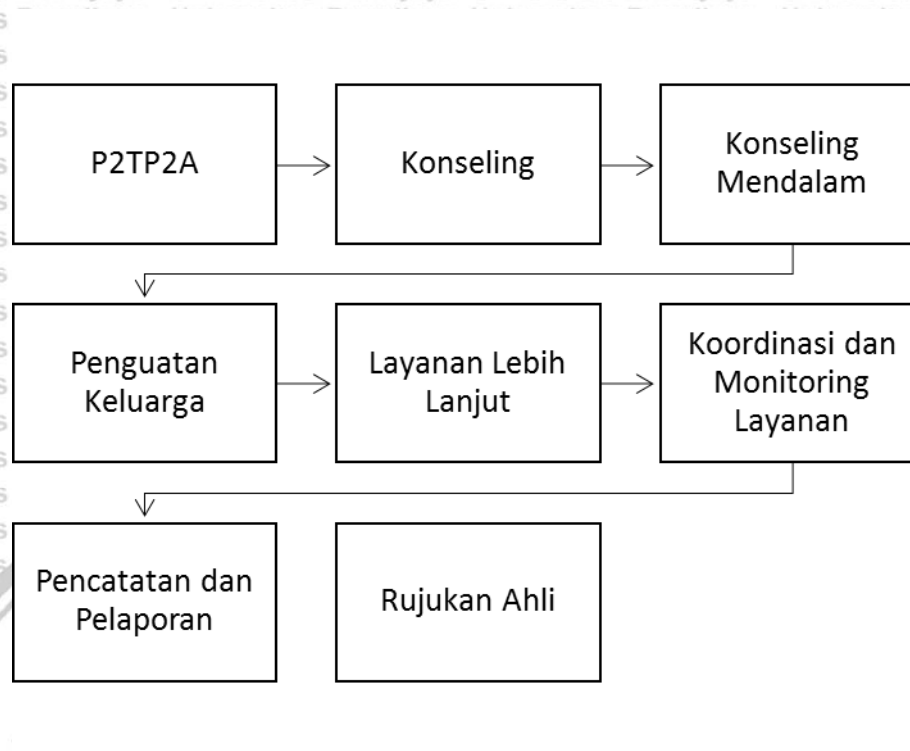
Pelayanan rehabilitasi sosial meliputi pelayanan konseling, penguatan keluarga, bimbingan rohani dan penyediaan rumah aman.

c. Penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi sosial

Pelayanan rehabilitasi sosial meliputi pelayanan konseling, penguatan keluarga, bimbingan rohani dan penyediaan rumah aman dilaksanakan oleh pekerja sosial, konselor PUSPAGA dan lembaga kesejahteraan sosial serta konselor pada Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak Kecamatan dan Desa serta rohaniawan terlatih baik milik Pemerintah ataupun berbasis lembaga keagamaan milik masyarakat.



Bagan 1.5 Langkah Pelayanan Rehabilitasi Sosial



Sumber : *Data Sekunder, diolah, 2021*

d. Langkah-langkah pelayanan rehabilitasi sosial

1. Petugas menerima surat tugas dari institusi terkait atau rujukan dari tempat layanan lain;
2. Petugas melakukan konseling;
3. Bila diperlukan rehabilitasi lanjutan, dan korban bersedia, maka petugas melakukan penanganan/konseling lanjutan;
4. Petugas melakukan penguatan keluarga berdasarkan pengasuhan jika sumber permasalahan ditemukan dalam keluarga;
5. Petugas akan merujuk korban yang memerlukan bimbingan rohani ke layanan bimbingan rohani;
6. Melakukan koordinasi dan monitoring layanan yang dirujuk ke pelayanan lain;
7. Bila korban memerlukan pelayanan lainnya (pelayanan kesehatan, penegakan dan bantuan

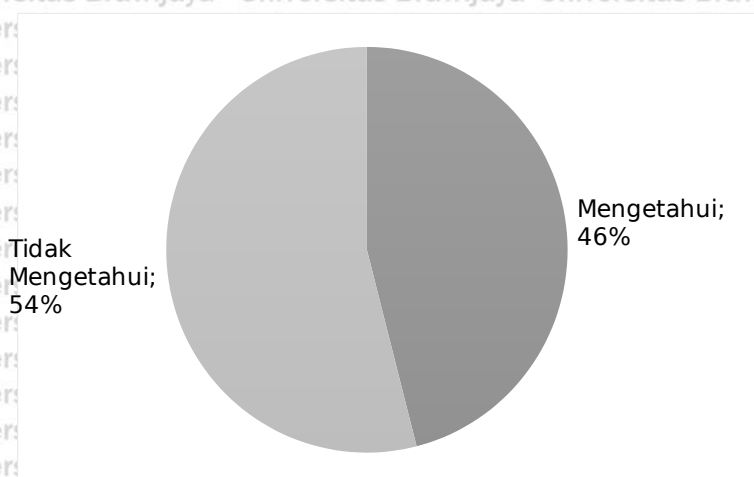
8. Pencatatan dan pelaporan pada P2TP2A.

Pelaksanaan perlindungan anak korban *bullying* yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek yang berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menemukan adanya beberapa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan tersebut. Hambatan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

PUSPAGA adalah suatu program unggulan yang dimiliki oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berbentuk layanan di bawah naungan langsung Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ada di setiap daerah. Layanan ini dapat memberikan segala informasi yang dibutuhkan terkait permasalahan keluarga termasuk permasalahan pada anak juga memberikan pendampingan apabila dibutuhkan ketika terjadi suatu permasalahan pada anak. Namun, yang terjadi di lapangan mayoritas masyarakat Kabupaten Trenggalek tidak mengetahui

keberadaan layanan PUSPAGA. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah ini

Grafik 1.2



Pengetahuan Masyarakat Trenggalek Terhadap Keberadaan PUSPAGA

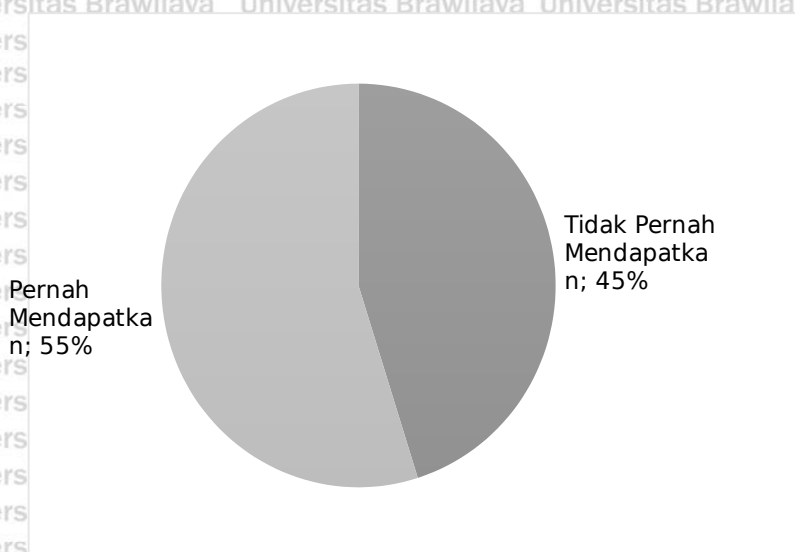
Sumber : *Data Primer, diolah, 2021*

Dari 113 responden yang keseluruhannya adalah masyarakat Kabupaten Trenggalek dengan rentan usia 25-48 tahun yang berasal dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Trenggalek. Diketahui bahwa 54% dari total responden yaitu sebanyak 61 orang tidak mengetahui adanya layanan PUSPAGA dan 46% responden yaitu sebanyak 52 orang mengetahui perihal layanan PUSPAGA. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa banyak masyarakat Kabupaten Trenggalek tidak mengetahui mengenai ketersediaan layanan PUSPAGA yang dimiliki Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek yang bergerak dalam bidang permasalahan keluarga. Hal ini dikarenakan karena kurangnya penyebaran informasi terkait PUSPAGA kepada masyarakat oleh PUSPAGA sendiri ataupun Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kurangnya penyebaran informasi terkait PUSPAGA atau bentuk layanan lainnya yang

berkaitan dengan kekerasan pada anak dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Grafik 1.3



Pengetahuan Masyarakat Trenggalek Terhadap Informasi Terkait Kekerasan Anak yang diberikan oleh Dinas sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sumber : *Data Primer, diolah, 2021*

Dari total 113 responden yang sama dengan grafik sebelumnya diketahui bahwa terdapat 55% responden yaitu sebanyak 62 orang pernah mendapatkan sosialisasi atau informasi terkait kekerasan anak termasuk tindakan *bullying* yang diberikan oleh PUSPAGA maupun Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek. Terdapat 45% responden yaitu sebanyak 51 orang belum pernah mendapatkan sosialisasi atau informasi terkait kekerasan anak termasuk tindakan *bullying* yang diberikan oleh PUSPAGA maupun Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek.

Sehingga dari data di atas dapat disimpulkan bahwa penyebaran dan/atau penyampaian informasi terkait kekerasan anak terutama mengenai tindakan *bullying* yang dilakukan oleh PUSPAGA maupun Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek belum menjangkau mayoritas masyarakat Kabupaten Trenggalek. Dimana kondisi

tersebut mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat apabila terdapat suatu peristiwa *bullying* dengan anak sebagai korban karena kurangnya pengetahuan dan informasi yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Trenggalek.

Dimana kondisi kurangnya partisipasi masyarakat mengakibatkan suatu keadaan yang apabila terdapat peristiwa *bullying* yang dialami oleh anak tidak dapat langsung ditangani atau mendapat perhatian semestinya dari pihak yang berkompeten karena terlambatnya informasi atau bahkan tidak adanya informasi yang diterima oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PUSPAGA terkait peristiwa tersebut. Sehingga pelaksanaan perlindungan hukum yang seharusnya dapat diterima oleh anak korban *bullying* sebagai hak terlambat untuk dilaksanakan atau bahkan tidak terlaksana.

2. Kurangnya Digitalisasi Informasi Layanan dan Aduan yang dilakukan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek

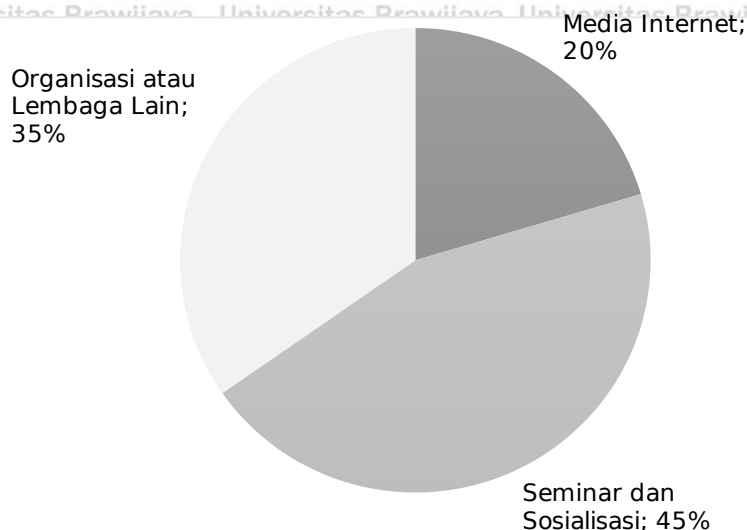
Dewasa ini pesatnya perkembangan teknologi dapat dirasakan dalam segala aspek kehidupan. Kondisi ini mengakibatkan ketergantungan masyarakat terhadap teknologi sangatlah tinggi, termasuk dalam hal mendapatkan informasi. Salah satu bentuk teknologi yang sangat mempengaruhi kondisi saat ini adalah internet. Dengan adanya internet informasi dapat dengan mudah diakses melalui *platform-platform* yang telah tersedia. *Platform* tersebut dapat berupa website maupun media sosial. Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu daerah yang merencanakan pembangunan berdasarkan *smart city*, dimana dalam perencanaan pembangunan tersebut salah satu faktor terpenting adalah dapat mengintegrasikan segala informasi dan komunikasi yang dimiliki daerah melalui teknologi internet sehingga dengan adanya konsep sedemikian masyarakat dimudahkan untuk dapat mengakses informasi maupun

layanan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu bagian dari pemerintah daerah yang menyediakan informasi serta layanan kepada masyarakat. Dalam kondisi di lapangan memang Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek sudah memiliki berbagai *platform* yang berupa situs web juga media sosial, namun sayangnya hal tersebut belum dimanfaatkan dengan baik oleh dinas bersangkutan.

- a. Situs Web Resmi : dinsosppa.trenggalekkab.go.id
- b. *Instagram* : [dinas_sosial_pppa_trenggalek](https://www.instagram.com/dinas_sosial_pppa_trenggalek)
- c. *Facebook* : [dinsospppatrenggalek](https://www.facebook.com/dinsospppatrenggalek)
- d. *Twitter* : [dinsosp3agalek](https://twitter.com/dinsosp3agalek)

Keempat *platform* diatas merupakan *platform* resmi yang dimiliki oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek. Dengan adanya media sedemikian rupa diharapkan masyarakat Trenggalek dapat lebih mudah dalam mengakses segala informasi maupun layanan, namun hal tersebut belum dimanfaatkan dengan baik. Kurangnya informasi yang *up-to-date* yang diunggah di *platform* serta penyampaian yang kurang kreatif mengakibatkan masyarakat tidak tertarik bahkan tidak mengetahui adanya *platform-platform* tersebut. Kondisi tersebut dibuktikan dengan sedikitnya masyarakat Kabupaten Trenggalek yang menerima informasi terkait Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui media internet yang digambarkan dalam grafik dibawah ini.

Grafik 1.4



Informasi yang Diterima oleh Masyarakat Kabupaten Trenggalek

Sumber : *Data Primer, diolah, 2021*

Sesuai dengan grafik diatas, dari total 113 responden sebanyak 50 orang pernah mendapatkan atau mencari informasi terkait layanan yang dimiliki oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek. Dari 50 orang tersebut hanya 10 orang yang mendapatkan informasi melalui media sosial atau *platform-platform* resmi yang dimiliki oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek. Dengan 22 orang pernah mendapatkan informasi yang berasal dari seminar dan sosialisasi yang diberikan oleh pihak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek dan 17 orang lainnya mendapat informasi dari organisasi masyarakat maupun lembaga pemerintahan yang lain yang bekerja sama dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek.

Sesuai dengan data diatas maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan atau pemanfaatan *platform-platform* internet resmi yang sudah dimiliki oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek masih kurang karena masih banyak masyarakat

Kabupaten Trenggalek yang mendapatkan informasi terkait layanan yang dimiliki oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek bukan dari *platform-platform* internet tetapi melalui media konvensional lainnya.

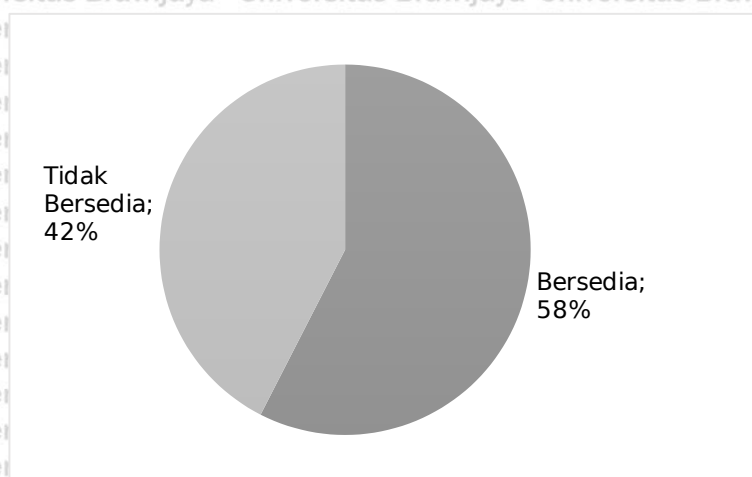
Digitalisasi layanan informasi dan aduan sangat penting untuk dilakukan, terutama dalam hal aduan. Karena dengan dilakukannya hal tersebut maka masyarakat yang mengetahui atau bahkan anak yang mengalami kondisi *bullying* tersebut dapat langsung melaporkan peristiwa tersebut dengan mudah dan cepat melalui platform digital yang tersedia. Sehingga pihak terkait dalam hal ini Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek dan/atau PUSPAGA dapat dengan mudah menerima laporan dan memproses laporan tersebut yang kemudian dilanjutkan dengan dilakukannya tindakan yang semestinya sesuai dengan kebutuhan kondisi. Dengan begitu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek melalui PUSPAGA dapat lebih tanggap dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying*.

3. Pengetahuan Orang Tua dan/atau Keluarga yang Terbatas terkait Permasalahan Pola Asuh pada Anak

Adanya kondisi dimana masyarakat kurang mendapat informasi maupun sosialisasi terkait keluarga mengakibatkan minimnya pengetahuan orang tua dan/atau keluarga terkait keluarga termasuk masalah pola asuh pada anak. Pola asuh pada anak yang dimiliki dalam lingkungan keluarga mempengaruhi bagaimana keluarga tersebut menyelesaikan suatu masalah atau menghadapi suatu kondisi yang berkaitan dengan anak, salah satunya adalah ketika anak yang menjadi korban *bullying*. Ketika terjadi suatu kondisi dimana salah satu anggota keluarga yang juga masih dalam kategori usia anak menjadi korban *bullying* banyak yang memilih untuk menyelesaikan kasus tersebut sendiri tanpa bantuan pihak

ketiga atau pihak yang berkompeten. Hal tersebut dibuktikan dalam grafik dibawah ini.

Grafik 1.5



Kesediaan

Masyarakat Kabupaten Trenggalek Melibatkan Pihak Ketiga dalam Penyelesaian Masalah *Bullying* pada Anak

Sumber : *Data Primer, diolah, 2021*

Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa dari 113 responden, sebanyak 58% responden yaitu 65 orang bersedia melibatkan pihak ketiga atau pihak yang berkompeten dalam penyelesaian kasus *bullying* pada anak yang dialami oleh anggota keluarganya sendiri dan sebanyak 42% responden yaitu 48 orang tidak bersedia apabila terdapat pihak ketiga atau pihak yang berkompeten dalam penyelesaian kasus *bullying* pada anak yang dialami anggota keluarganya sendiri.

Pada kondisi tersebut memang mayoritas masyarakat Kabupaten Trenggalek masih memahami bahwa apabila mengalami kasus sedemikian dibutuhkan keterlibatan pihak yang berkompeten dalam penyelesaiannya sehingga permasalahan yang terjadi akan dapat diselesaikan secara cepat serta tepat. Dikhawatirkan apabila tidak dilibatkan pihak yang berkompeten dalam penyelesaian kasus tersebut mengakibatkan tidak tepatnya proses penyelesaian yang digunakan sehingga dimungkinkan terjadinya kondisi yang

semakin rumit dan merugikan salah satu atau kedua pihak terutama pihak anak yang menjadi korban. Tidak dikehendaknya terlibatnya pihak yang berkompeten adalah karena anggapan bahwa tindakan *bullying* yang dilakukan oleh anak merupakan tindakan normal yang dilakukan bukan dianggap sebagai tindakan yang serius yang membutuhkan pihak yang berkompeten dalam penyelesaiannya.

Masyarakat atau keluarga wajib melakukan suatu upaya apabila melihat atau mengetahui suatu tindakan kekerasan terhadap anak, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 64 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak yaitu

Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk : a.)mencegah berlangsungnya tindak pidana; b.)memberikan perlindungan pada korban; c.)memberikan pertolongan darurat; dan d.)membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Dengan adanya peraturan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat wajib untuk berperan serta dalam melakukan perlindungan terhadap korban. Bentuk peran serta yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam melakukan perlindungan terhadap korban terdapat pada Pasal 65 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak yaitu

Peran serta masyarakat diwujudkan dengan tindakan memberi informasi dan/atau melaporkan adanya kekerasan serta tindak pidana terhadap perempuan dan anak kepada penegak hukum atau pihak berwajib, atau turut serta dalam menangani korban kekerasan serta tindak pidana terhadap perempuan dan anak.

Sehingga masyarakat berkewajiban ikut andil dalam pelaksanaan perlindungan korban kekerasan serta tindak

pidana terhadap perempuan dan anak, salah satunya yaitu anak yang merupakan korban tindakan *bullying*. Dimana apabila masyarakat tersebut tidak mampu untuk melaksanakan upaya tersebut maka dapat meminta bantuan kepada pihak yang berkompeten sehingga pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban tetap terlaksana dengan semestinya.

4. Kondisi Geografis Kabupaten Trenggalek

Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek secara ketinggian tempat Kabupaten Trenggalek sendiri terdiri dari 2/3 wilayah pegunungan dan 1/3 lainnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0 sampai 690 meter di atas permukaan air laut. Dua pertiga wilayah Kabupaten Trenggalek yang merupakan kawasan pegunungan dataran rendah memiliki ketinggian antara 0 hingga di atas 100 meter di atas permukaan laut, dan ketinggian tersebut 53,8% berketinggian 100-500m. Kabupaten Trenggalek sebagian besar bertopografi terjal lebih dari 40% seluas ± 28.378 ha yang merupakan daerah rawan bencana longsor. Sebagian besar lahan ini merupakan lahan kritis yang rentan mengalami gerakan tanah. Hal tersebut dapat diketahui dari data dibawah ini

Tabel 1.2
Kondisi Topografi Kabupaten Trenggalek

KECAMATAN N	JENIS TANAH	TOPOGRAFI	KETINGGIA N (m.Dpl)
Panggul	Mediteran	Pegunungan	T7
Munjungan	Mediteran	Datar>Peg	T5
Watulimo	Mediteran	Datar>Peg	T299
Kampak	Mix		
	Mediteran	Pegunungan	T120
	Mix		
Dongko	Mediteran	Pegunungan	T532
Pule	Aluvial	Datar>Peg	T625
Karangan	Aluvial	Datar	
Suruh	Mediteran	Pegunungan	T112
Gandusari	Aluvial	Datar	
Durenan	Aluvial	Datar	
Pogalan	Aluvial	Datar	
Trenggalek	Aluvial	Datar	
Tugu	Mediteran	Datar>Peg	T135
Bendungan	Latosal	Pegunungan	T690

Sumber: Badan Pusat Statistika Kabupaten Trenggalek 2018

Dari data diatas dapat diketahui bahwa dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Trenggalek, 9 kecamatan diantaranya merupakan wilayah yang memiliki kondisi topografi berupa pegunungan sedangkan 5 kecamatan lainnya merupakan wilayah daratan. Kondisi yang sedemikian mengakibatkan akses menuju kecamatan-kecamatan yang bertopografi pegunungan memiliki kendala. Kondisi tersebut diperparah ketika musim hujan dan terjadi bencana tanah longsor karena daerah-daerah pegunungan tersebut juga merupakan daerah yang rawan terkena bencana tanah longsor.

Melihat kondisi topografi wilayah Kabupaten Trenggalek maka untuk dapat menjangkau daerah-daerah tersebut apabila Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek harus turun langsung ke lapangan maka dibutuhkan anggaran juga tenaga yang besar untuk dapat terlaksana program yang sedemikian. Hambatan tersebut berdasarkan hasil

wawancara dengan Ibu Ratri Purwa N. Dari bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek Sehingga. Kondisi ini menjadi salah satu penghambat penyampaian informasi untuk dapat bisa menjangkau seluruh daerah yang ada di Kabupaten Trenggalek. Selain menjadi penghambat penyampaian informasi, kondisi ini juga menghambat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek dan/atau PUSPAGA dalam melakukan pendampingan sebagai wujud bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying* yang bertempat tinggal di daerah termasuk ke dalam daerah yang sulit untuk dijangkau. Sehingga pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak tersebut tidak berjalan dengan optimal karena adanya hambatan tersebut.

D. Upaya yang Dapat Dilakukan dalam Pelaksanaan Perlindungan Anak Korban *Bullying* Oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek

1. Melaksanakan Pertemuan terkait Perempuan, Anak, Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya Secara Rutin

Kegiatan pertemuan terkait perempuan, anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya sebaiknya dilakukan secara rutin. Hal tersebut dimaksudkan agar tersampainya informasi secara berkala terkait hal-hal yang berhubungan dengan perempuan, anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya kepada masyarakat. Kegiatan tersebut telah dilakukan secara rutin oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek dalam suatu kegiatan yang dinamakan MUSRENA KEREN (Musyawarah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya) yang diadakan setiap tahun. Dinas

Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek dalam rangka meningkatkan minat serta pengetahuan kepada masyarakat Trenggalek terhadap fungsi yang dimiliki oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan fungsi dinas. Salah satu contoh kegiatan yang dilakukan adalah diadakannya MUSRENA KEREN (Musyawarah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya) setiap tahunnya yang sudah dimulai sejak tahun 2019. Kegiatan ini bertujuan untuk mengakomodasi kepentingan perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan lainnya serta meningkatkan akses, manfaat, partisipasi dan kontrol guna mendukung perencanaan pembangunan.⁴¹ Dalam kegiatan ini tidak hanya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tetapi juga dinas-dinas serta pihak-pihak terkait lainnya. MUSRENA KEREN ini merupakan wadah penampung dan penjangkauan aspirasi masyarakat, dan dunia usaha untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah serta hal ini menunjukkan dalam pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (*bottom-up planning*) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi.⁴² Musyawarah ini diadakan dari tingkat daerah terkecil yaitu Desa, Kecamatan dan Kabupaten, karena ketentuan yang sedemikianlah maka disebut dengan *bottom-up planning*. Dipilihnya sistem *bottom-up planning* dalam kegiatan ini diharapkan agar seluruh partisipasi masyarakat dapat ditampung dan diapresiasi dengan baik oleh pihak terkait, termasuk juga informasi yang diberikan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dalam hal ini merupakan pihak ini yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan ini dapat menjangkau seluruh

⁴¹Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya dalam Mendukung Musyawarah Perencanaan Pembangunan, dalam menimbang (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 1).

⁴²*Ibid*, Lampiran Pelaksanaan Musrena Kabupaten. hlm. 39.

masyarakat tanpa terkecuali. Melalui musyawarah ini dapat menghasilkan komunikasi dua arah antara masyarakat juga Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kegiatan ini dapat mengoptimalkan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying*. Karena dalam kegiatan ini Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pihak penyelenggara dapat menyampaikan informasi terkait penanganan anak korban *bullying* kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui dan memahami bagaimana untuk dapat ikut andil dalam pelaksanaan perlindungan anak korban *bullying* ini. Sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peristiwa anak yang menjadi korban *bullying*.

Kegiatan MUSRENA KEREN tingkat Kabupaten tahun 2021 juga dihadirkan narasumber-narasumber yang dapat menambah informasi terkait perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan lainnya salah satunya adalah Ketua UNICEF Indonesia yaitu Ibu Debora Comini. Musrena tahun 2021 diadakan secara virtual dan disiarkan langsung melalui platform youtube milik Dinas KOMINFO Kabupaten Trenggalek sehingga dapat diakses oleh masyarakat umum dan dapat membantu masyarakat Trenggalek menambah informasi terkait perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan lainnya, terutama permasalahan anak. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat membantu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek dapat memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan upaya promotif dan preventif terhadap perlindungan anak korban *bullying*.

2. Meningkatkan Fasilitas Layanan Informasi dan Aduan dalam Bentuk Digital

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini sangatlah pesat. Kondisi demikian mempengaruhi

hampir seluruh aspek kehidupan tanpa terkecuali. Hal tersebut mengakibatkan banyak pihak yang berlomba-lomba

memanfaatkan serta mengolah teknologi tersebut, salah satunya adalah dalam bidang pelaksanaan pemerintahan.

Pengolahan teknologi informasi dan komunikasi ini diharapkan dapat memaksimalkan pemberian layanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Sehingga timbul sebutan *smart city*

atau *sustainable city* yang sedang banyak dikembangkan di berbagai daerah di Indonesia. Lahirnya *smart city* merupakan

salah satu langkah hebat yang dilakukan untuk memajukan suatu kota dalam satu negara yang memiliki basis teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Secara harfiah, *smart city*

diartikan sebagai kota pintar dengan memiliki filosofi desainnya adalah untuk kepentingan masyarakat, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya agar efisien dan efektif.⁴³ Konsep

smart city juga telah didukung oleh pemerintah yang ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun

2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dalam peraturan tersebut pengertian dari sistem pemerintahan berbasis elektronik disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 1 yaitu

penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu daerah yang memiliki perencanaan *smart city* dalam tata pemerintahannya.

Dalam hal ini pemerintahan Kabupaten Trenggalek bekerja sama dengan Institut Teknologi Surabaya (ITS) telah

membentuk *masterplan e-government* tahun 2018-2022. Salah satu isi dari *masterplan* tersebut adalah mendigitalisasi

layanan publik. Hal tersebut juga diwujudkan dalam Renana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Trenggalek

dimana salah satu hal yang ingin dicapai dalam RKPD tahun

⁴³Abdurrozzaq Hasibuan, Oris Kristanto Sulaiman, **Smart City Konsep Kota Cerdas Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Perkotaan Kabupaten/Kota, di Kota-Kota Besar Provinsi Sumatera Utara**, Buletin Utama Teknik, Vol.14 No.2, 2019, hlm.127.

2020 adalah sinergitas pembangunan pariwisata dan implementasi *e-government* dalam rangka peningkatan daya saing daerah dan pelayanan publik. Untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan maka dukungan dari seluruh lapisan dan sektor yang ada di pemerintahan Kabupaten Trenggalek tanpa terkecuali, terutama pihak-pihak yang berada dalam bidang pemberian layanan publik.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan salah satu satuan yang bergerak dibidang pelayanan publik. Sehingga keberhasilan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan pelayanan publik dalam bentuk digital menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pencapaian tujuan dari RKPD tersebut. Dalam kondisi di lapangan pemberian layanan publik melalui digital yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek belum tercapai. Kondisi tersebut dapat diperbaiki dengan dilakukannya kerja sama lintas sektor, dalam hal ini dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek. Tindakan kerja sama yang dilakukan juga sesuai dengan salah satu visi dan misi yang dimiliki oleh Bupati Kabupaten Trenggalek yaitu perwujudan pemerintahan kolaboratif dalam rangka memastikan pelayanan publik yang prima. Dengan adanya kerja sama lintas sektor yang dilakukan diharapkan dapat memaksimalkan digitalisasi pelayanan publik yang berupa pemberian layanan atau penerimaan aduan yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek.

3. Melakukan Kerjasama dengan Memberdayakan Organisasi Kemasyarakatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang Terdapat di Setiap Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

pada Pasal 1 Ayat 5 menjelaskan mengenai Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yaitu

“Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, selanjutnya disingkat Gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.”

PKK memiliki beberapa tugas dan fungsi dalam pelaksanaan kegiatannya, salah satu tugas yang dimiliki oleh PKK adalah menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk terlaksananya program-program PKK. Dengan adanya tugas tersebut maka secara tidak langsung organisasi PKK ikut bertanggung jawab atas terpenuhinya hak-hak yang dimiliki oleh setiap anggota keluarga termasuk anak. Untuk memaksimalkan pelaksanaan program-program yang dimiliki oleh Organisasi PKK maka PKK juga memiliki fungsi untuk mengadakan kerjasama dengan mitra kerja dan instansi terkait, Lembaga Kemasyarakatan, lembaga donor dari dalam dan luar negeri, LSM, dunia usaha, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dengan prinsip kemitraan, kesejajaran dan atau kesetaraan, serta saling menguntungkan.

Kondisi yang sedemikian sangat menguntungkan bagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek dikarenakan dengan adanya kondisi tersebut dapat memudahkan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek dalam melaksanakan program perlindungan hak anak bisa sampai diseluruh penjuru daerah yang ada di Kabupaten Trenggalek tanpa terkecuali. Hal tersebut juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Partisipasi

Kegiatan yang dapat dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek dengan bekerja sama dengan organisasi PKK adalah pemberian sosialisasi mengenai perlindungan hak anak serta bagaimana penanganan apabila terjadi pelanggaran hak anak kepada setiap perwakilan PKK daerah yang dapat dilakukan di Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek untuk kemudian hasil dari pemberian sosialisasi tersebut diteruskan oleh setiap perwakilan PKK daerah kepada masyarakat yang ada di daerahnya masing-masing. Selain itu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga dapat memberikan pelatihan kepada perwakilan PKK tersebut dalam melakukan tindakan pendampingan terhadap anak korban

70

bullying tersebut. Sehingga dengan adanya bentuk kegiatan sedemikian dapat mengefisiensi kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek serta dapat menjangkau seluruh daerah yang ada di Kabupaten Trenggalek tanpa terkecuali sehingga diharapkan semakin banyak masyarakat Kabupaten Trenggalek yang perhatian juga memahami mengenai perlindungan hak anak termasuk dapat berperan aktif dalam hal pencegahan tindakan *bullying* kepada anak dan bagaimana penanganannya.

4. Pemberian Anggaran Khusus oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu model penganggaran pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang menerminkan program tahunan pemerintah.⁴⁵ Anggaran tersebut berisi rencana keuangan yang terdiri dari rencana pendapatan apa saja serta rencana pengeluaran untuk satu tahun ke depan. Didalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi yang berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara.⁴⁶ APBD adalah merupakan penjawantahan rencana kerja Pemerintah Daerah dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahunan dan berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik.⁴⁷ Dengan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa peran APBD

⁴⁵Hanif Nurcholis, **Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah**, Grasindo, Jakarta, 2007, hal 110.

⁴⁶Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, penjelasan hlm. 5 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.4286.

⁴⁷Ledy S. Gagola, Jullie J. Sondakh, Jessy D.L Warongan, **Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud**, Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "GODWILL", Vol.8 No.1, hlm. 109.

sangatlah penting dalam menentukan keberhasilan program pemerintah yang dijalankan.

Dapat dijalankan atau tidaknya suatu program yang dimiliki oleh suatu pemerintah daerah bergantung pada ada atau tidaknya anggaran yang diberikan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, termasuk program-program yang dimiliki oleh sektor-sektor yang ada di Pemerintah Daerah. Dalam hal ini Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek yang merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang membantu dalam pelaksanaan program-program yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek salah satunya pemenuhan hak anak. Pemberian anggaran terhadap proses tersebut juga disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak yaitu

Pengarusutamaan hak anak adalah strategi mengintegrasikan isu-isu dan hak-hak anak ke dalam setiap tahapan pembangunan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas Peraturan Perundang-Undangan, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran dengan prinsip-prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Penanganan anak korban tindakan *bullying* termasuk dari tindakan pemenuhan hak anak. Dalam memaksimalkan penanganan anak korban tindakan *bullying* tersebut maka dibutuhkan peningkatan dari berbagai aspek dan dalam hal ini yang harus dijadikan perhatian utama yaitu mengenai pemberian layanan baik layanan informasi maupun layanan aduan. Dalam peningkatan berbagai aspek tersebut terutama layanan informasi dan layanan aduan maka dibutuhkan dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek salah satunya berupa pemberian anggaran.

Terjadi perubahan anggaran pada APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek tahun 2020 dimana anggaran yang diperuntukkan kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak mengalami penurunan sebesar 19,20% yaitu yang sebelumnya sebesar Rp. 10.169.955.634.- berubah menjadi Rp. 8.217.481.466.- dan untuk anggaran yang khusus diperuntukkan kepada sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) turun sebesar 39,98% yaitu yang sebelumnya sebesar Rp. 1.203.000.000,- menjadi Rp. 723.205.250,-.⁴⁸ Dengan adanya kondisi yang sedemikian maka terdapat beberapa program yang dimiliki oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek khususnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak dapat dijalankan karena tidak adanya dukungan biaya pada program-program tertentu. Terdapat beberapa program yang tidak dapat dimasukkan dalam APBD karena adanya *limitasi* anggaran pada tahun 2020, salah satunya adalah mengenai peningkatan dan perluasan layanan informasi dan layanan aduan terutama yang berhubungan dengan permasalahan hak anak.

Sehingga dalam kondisi yang sedemikian diharapkan peran serta dan dukungan dari pemerintahan Kabupaten Trenggalek sangatlah dibutuhkan salah satunya berupa pemberian anggaran yang dikhususkan untuk peningkatan program-program yang berhubungan dengan pemberian layanan-layanan dengan tujuan pemenuhan hak anak salah satunya dalam perlindungan anak korban *bullying*. Terkait kewajiban pemerintah daerah tersebut disebutkan dalam Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak yaitu Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Baik program-program yang berupa pencegahan maupun program-program dalam hal penanganan.

⁴⁸ Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 10 Tahun 2020 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Lampiran II hlm. 1 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 10)



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian hasil dan pembahasan yang telah dijabarkan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek dalam melaksanakan perlindungan terhadap anak korban *bullying* sudah sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu dengan melaksanakan upaya perlindungan secara Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif juga dalam melaksanakan upaya perlindungan tersebut sudah selaras dengan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Kabupaten Trenggalek serta sesuai dengan standar operasional pelaksanaan yang dimiliki oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek tersebut, namun dalam pelaksanaannya masih belum maksimal karena masih ditemukan anak yang menjadi korban *bullying* di Kabupaten Trenggalek.
2. Terdapat hambatan dalam pelaksanaan perlindungan anak korban *bullying* yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek yaitu kurang dikenalnya PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) dikalangan masyarakat Kabupaten Trenggalek, digitalisasi layanan informasi dan aduan yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak belum terlaksana dengan baik, pengetahuan masyarakat Kabupaten Trenggalek terkait pola asuh anak masih minim, dan kondisi geografis Kabupaten Trenggalek. Serta upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan pertemuan tentang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya, meningkatkan

fasilitas layanan informasi dan aduan dalam bentuk digital, melakukan kerja sama dengan memberdayakan organisasi kemasyarakatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang Terdapat di Setiap Desa, dan Pemberian Anggaran Khusus Oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

B. Saran

Dari rumusan masalah yang penulis kemukakan serta pembahasan yang berupa teori juga data, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Seharusnya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek lebih memperhatikan cara-cara yang lebih efektif serta efisien yang dapat memaksimalkan pelaksanaan perlindungan anak korban *bullying* yang juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek ikut lebih berperan dalam pelaksanaan perlindungan korban *bullying* salah satunya dengan cara memberikan anggaran khusus yang diperuntukkan untuk pengembangan program-program terkait layanan informasi dan aduan perihal penanganan anak korban *bullying*.
3. Seharusnya peran masyarakat Kabupaten Trenggalek terutama orang tua dalam berpartisipasi dan ikut andil bagian lebih besar dengan mencari informasi serta memahami bagaimana pemenuhan hak anak salah satunya pelaksanaan perlindungan anak korban *bullying* sehingga dapat tercipta Kabupaten Trenggalek kota layak anak.

Daftar Pustaka

BUKU

Arikunto Suharsimi, **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek**, Rineke Cipta, Jakarta, 2002.

Ashofa Burhan, **Metode Penelitian hukum**, Rineka Cipta, Jakarta 1998.

Muhammad Ashri, **Hak Asasi Manusia Filosofi, Teori & Instrumen Dasar**, CV. Social Politic Genius (SIGN), Makassar, 2018.

Hamid Jazim, Herlin Wijayati, Irham Rosyidi, dkk, **Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif**, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2008.

Hasan M. Ikbai, **Pokok-pokok Materi Statistik**, Bumi Aksara, Jakarta, 1999.

Iskandar Pranoto, **Hukum HAM Internasional Sebuah Pengantar Kontekstual**, IMR Press, Cianjur, 2012.

Krisna Liza Agnesta, **Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum**, Deepublish, Yogyakarta, 2018.

Lefaan Viltra Biljana Bernadethe, Yana Suryana, **Tinjauan Psikologi Hukum dan Perlindungan Anak**, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2018.

Maleong Lexy J, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2011.

Nurcholis Hanif, **Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah**, Grasindo, Jakarta, 2007.

Sapitri Widya Ayu, **Cegah dan Stop Bullying Sejak Dini**, Guepedia, 2020.

Soekanto Soerjono, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 2012.

Solihin M. Firdaus, **Kamus Hukum Kontemporer**, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Sunggono Bambang, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo, Jakarta, 2003.

Syamsudin M., **Operasionalisasi Penelitian Hukum**, Raja Grafindo, Jakarta, 2007.

Taneko Soleman B, **Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat**, Rajawali Press, Jakarta, 1993.

Tim ICCE UIN Jakarta, **Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani**, Prenada Media, Jakarta, 2003.

Universitas Brawijaya, 2015, **Pedoman Penulisan Karya Ilmiah**, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang

Usman Nurin, **Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum**, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2002.

JURNAL

Budoyo Indarto Imam, Strategy Mengatasi Delinkuensi Pada Remaja Sekolah Menengah Pertama (SMP), dipresentasikan dalam Prosiding Seminar Nasional & Call Paper Psikologi Sosial 2019 Fakultas Pendidikan Psikologi UNESA.

Cahyandari Dewi, Kajian Yuridis Pelimpahan Kewenangan Monopoli Negara Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial, *Legal Spirit*, Jilid 2, 2018, hlm. 19-33

Fitriani Rini, Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol.II No.2, 2016.

Gagola Ledy S., Jullie J. Sondakh, Jessy D.L Warongan, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "GODWILL"*, Vol.8 No.1, hlm. 108-117

Hasibuan Abdurrozzaq, Oris Kristanto Sulaiman, *Smart City* Konsep Kota Cerdas Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Perkotaan Kabupaten/Kota, di Kota-Kota Besar Provinsi Sumatera Utara, *Buletin Utama Teknik*, Vol.14 No.2, 2019, hlm.127-135.

Kondoy Eka Alvita, J.H. Posumah, Very Y. Londa, Peran Tenaga Medis Dalam Pelaksanaan Program Universal Coverage Di Puskesmas Bahu Kota Manado, *Jurnal Administrasi Publik UNSRAT*, 2017.

Putra Bayu Firminda, Pemenuhan Hak Perlindungan dan Keamanan Untuk Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan, *Skripsi* tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2017.

Ramdhani Abdullah, Muhammad Ali Ramdhani, Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik, Jurnal Publik, Vol.11 No. 01, 2017, hlm. 1-12.

Rastati Ranny, Bentuk Perundungan Siber di Media Sosial dan Pencegahannya Bagi Korban dan Pelaku, Jurnal Sosioteknologi, Vol.15No.2, 2016.

Sufriani, Eva Purnama Sari, Faktor Yang Mempengaruhi Bullying Pada Anak Usia Sekolah Disekolah Dasar Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh, Idea Nursing Journal, Vol VIIINo.3, 2017.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286.

Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 35)

Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya dalam Mendukung Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 1).

Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 10 Tahun 2020 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 10)

ARTIKEL

Tim KPAI, Sejumlah Kasus Bullying Sudah Warnai Catatan Masalah Anak di Awal 2020, Begini Kata Komisioner KPAI, Berita KPAI, 10 Februari 2020 (diakses paa 22 Oktober 2020 di laman <https://www.kpai.go.id/berita/sejumlah-kasus-bullying-sudah-warnai-catatan-masalah-anak-di-awal-2020-begini-kata-komisioner-kpai>).

Lampiran 1

DAFTAR RESPONDEN

NO	NAMA	L/P	Usia	Alamat
1	Agus Riyanto	L	46	Karangan
2	Nunung Tri S	P	45	Karangan
3	Nabila Ahnafi Salsabila	P	23	Karangan
4	Irma Liyanti	P	35	Karangan
5	Indi Setyani	P	43	Gandusari
6	Taufan Maulana	L	38	Trenggalek
7	Ririn Fatmawati	P	49	Trenggalek
8	Rahardjo Khoerniawan	L	38	Bendungan
9	Nanik Dwi Handayani	P	32	Karangan
10	Ery Nyaminingsih	P	46	Tugu
11	Munarwati	P	42	Trenggalek
12	Yumeri Wulan	P	47	Tugu
13	Fira Rian Nugraheni	P	24	Gandusari
14	Nyaris Andini	P	38	Durenan
15	Siti Hanik Sumiasti	P	48	Durenan
16	Sri Utami	P	47	Tugu
17	Feri	P	28	Pule
18	Sulastri	P	49	Bendungan
19	Ita Fatmawati	P	33	Suruh
20	Husen Susanto	L	48	Bendungan
21	Amalia Mardatilah	P	23	Munjungan
22	Budi Waluyo	L	41	Suruh
23	Luluk Sustiana	P	37	Suruh
24	Nafisah Ratnawati	P	48	Karangan
25	Iswati	P	40	Kampak
26	Laili Rohmiati	P	38	Gandusari
27	Mareta Dwi	P	31	Trenggalek
28	Indah Purnamawati	P	35	Karangan
29	Siti Nur Azizah	P	46	Pogalan
30	Mahmud Mugi Laksono	L	23	Trenggalek
31	Ian Imana	L	24	Gandusari
32	Nur Rohana Widya	P	31	Pule
33	Kusnadi	L	44	Kampak
34	Siti Srimunah	P	45	Durenan
35	Joko Waluyo	L	48	Trenggalek
36	Vegra Sutwantoro	L	24	Kampak

37	Fatkhadina Nuri Azka	P	23	Pogalan
38	Diyah Ayu Kurniawati	P	29	Dongko
39	Wiwik Widiastuti	P	40	Munjungan
40	Hidayah Tamimi	P	49	Tugu
41	Afifah Kulsum	P	24	Panggul
42	Nurul Aini	P	49	Trenggalek
43	Lumatun Nurroniyah	P	45	Trenggalek
44	Sucipto	L	37	Munjungan
45	Agus Malik	L	42	Durenan
46	Ana Mardia	P	30	Panggul
47	Rian Rozaki	L	26	Pule
48	Ulfi Azizah	P	47	Kampak
49	Dwi Septya	P	32	Panggul
50	Isna Siyami R	P	25	Durenan
51	Niken Wahyu S	P	21	Tugu
52	Rizka Y	P	27	Dongko
53	Silmi Nurin	P	25	Trenggalek
54	Fahma Diena	P	24	Pogalan
55	Nurhidayati	P	47	Suruh
56	Siti Masrurroh	P	48	Karangan
57	Yeri	L	27	Durenan
58	Tri Utari	P	28	Durenan
59	Kartika Ayu	P	24	Trenggalek
60	Wawan Sutrisno	L	31	Kampak
61	Agus Subodo	L	49	Karangan
62	Nandha Sukma	P	24	Watulimo
63	Siti Chodiyah	P	49	Pule
64	Elmi	P	46	Karangan
65	Khususiyah	P	49	Gandusari
66	Arifuna	P	22	Watulimo
67	Riska Wahyu	P	27	Trenggalek
68	Very Ardianto	L	26	Dongko
69	Fitrah	L	25	Pule
70	M. Irvan Ali	L	23	Dongko
71	Fauzan Rusyaidi	L	20	Pogalan
72	Muiz Al-Hakim	L	39	Tugu
73	Oktarina	P	28	Munjungan
74	Sarlim	L	48	Pogalan
75	Wafiq Hisyam	L	24	Dongko
76	Ima Fuad	P	32	Durenan
77	Suparmiati	P	48	Gandusari
78	Nandhea Exza	P	23	Watulimo
79	Sukardi	L	48	Panggul
80	Fathurrouf	L	36	Suruh

81	Ayu Widya	P	26	Trenggalek
82	Siti Umi Kulsum	P	48	Durenan
83	Nugroho	L	27	Gandusari
84	Qoyin N	L	24	Watulimo
85	Eny Winarti	P	42	Trenggalek
86	Amanat	L	44	Suruh
87	Tutik	P	49	Karangan
88	Maya Rianti	P	25	Durenan
89	Rikha Fuadah	P	24	Gandusari
90	Masna Laila	P	24	Kampak
91	Dinar Rohana	P	23	Durenan
92	Alvi Khoirun	P	25	Tugu
93	Luthfi	P	27	Pule
94	Anik	P	47	Karangan
95	Vista Damaynti	P	28	Durenan
96	Ayunina	P	24	Tugu
97	Mustika Devi	P	24	Durenan
98	Firda Wahyu	P	27	Suruh
99	Novia Anggraini	P	25	Karangan
100	Ifada	P	22	Karangan
101	Muyasaroh	P	38	Gandusari
102	Brili W.	L	26	Watulimo
103	Solikin	L	49	Durenan
104	Rodin	L	48	Suruh
105	Sunaris	L	49	Pule
106	Frischa	P	27	Trenggalek
107	Danang Iswanto	L	37	Kampak
108	Sri Windiyati	P	48	Trenggalek
109	Zainal Arifin	L	48	Bendungan
110	Alfi Amirotus S.	P	23	Trenggalek
111	Abdul Malik	L	46	Durenan
112	Wiwik Yulianingsih	P	37	Durenan
113	Yogik	L	29	Karangan